

ektorat ayaan

Laporan Tahunan DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2008





Pusat Informasi dan Humas Departemen kebudayaan dan pariwisata

Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110
Telp +62 21 3838167
Fax. +62 21 384 9715
www.budpar.go.id
pusformasbudpar@budpar.go.id





Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam penyusunan buku Laporan Tahunan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008, sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Berbagai kendala dan tantangan telah kita hadapi selama tahun 2008, akan tetapi berkat kerja keras dan semangat bersama stakeholder maka agenda pembangunan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan devisa yang masuk tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2007.

Kebudayaan merupakan salah satu akar yang mengokohkan bangsa ini. Perhatian besar telah dicurahkan pada bidang ini walau pembangunannya perlu melalui tahapan-tahapan yang berjenjang. Mulai dari perfilman yang kembali bangkit dan telah menjadi tuan rumah di negeri sendiri, hingga perlindungan dan pengembangan aset-aset budaya yang tangible dan intangible pun telah dilakukan.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menetapkan tahun 2008 sebagai tahun kunjungan ke Indonesia/Visit Indonesia Year (VIY) 2008. Program ini merupakan upaya mendorong kepariwisataan Indonesia agar lebih berperan dan berkontribusi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional, dan diharapkan pula sebagai tonggak kebangkitan pariwisata Indonesia.

Melalui buku ini, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata akan terus berupaya meningkatkan performanya dengan komitmen dan dedikasi terus menerus. Harapan kami semoga buku ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk menyusun berbagai kebijakan dalam rangka pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan, serta memberi manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak terutama bagi para pelaku pariwisata dalam upaya bersama untuk memajukan kebudayaan dan kepariwisataan nasional.

Jakarta, Januari 2009 Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Daftar Isi

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pendahi	ıluan	1
Profil D	epartemen Kebudayaan dan Pariwisata	3
1. 2.	Visi dan Misi Tugas Pokok dan Fungsi	3
Tujuan o	dan Sasaran Pembangunan Pariwisata Menurut RENSTRA 2005-2009	5
Kebijak	an Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2008	6
1. 2. 3.	Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Kebijakan Pembangunan Bidang Kebudayaan Kebijakan Pembangunan Bidang Pariwisata	6 6 7
Kebijak	an Strategis Departemen kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008	8
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Program Pengembangan Kemitraan Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	8 9 10 11 12 13 13

DAFTAR ISI

Sekretariat Jenderal	15
Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film	31
Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala	39
Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pemasaran	53
Direktorat Jenderal Pemasaran	65
Inspektorat Jenderal	81
Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata	89
Staf Ahli	97
Rekor Baru Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Jumlah Penerimaan Devisa	99
Struktur Organisasi	101
Profil Sumber Dava Manusia	102



Dalam rangka terwujudnya good governance yang merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada seluruh jajaran aparatur negara, sehingga tercipta sistem administrasi negara modern yang handal, demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Seiring dengan semangat reformasi program-program pembangunan nasional yang diwujudkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance.

Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi KKN, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public* goods and services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang bersifat multi-sektoral dan multi-disiplin, dalam suatu system yang sinergis dan merupakan bagian integral yang berkesinambungan, Departemen

Kebudayaan dan Pariwisata harus mampu menjadi sarana mengejawantahkan cita-cita dan tujuan nasional yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memperkukuh jati diri bangsa serta dapat menjadi piranti untuk ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan atas kemerdekaan, keadilan sosial guna mewujudkan perdamajan abadi antara bangsa-bangsa di dunia.

Tugas utama pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah agar mampu menjawab agenda prioritas yaitu mempercepat pemulihan ekonomi, memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan yang bersumber kepada sistem ekonomi kerakyatan serta membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya. Pembangunan budaya memiliki peran dalam memperkokoh ketahanan budaya dan keutuhan nasional dari konflik horizontal maupun vertical yang dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa. Adapun persoalan dalam pengembangan kebudayaan adalah bagaimana membangun karakter bangsa serta bagaimana setiap warga negara diberi akses untuk saling mengenal kebudayaan yang berbeda agar dapat hidup bersamasama secara damai.

Permasalahan kebudayaan yang lain adalah masih terjadinya krisis jati diri yang tercermin dari melunturnya nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan nasional dan rasa cinta tanah air karena menguatnya nilai-nilai materialisme dan hedonisme. Hal ini juga mempunyai pengaruh pada pengelolaan budaya yang masih lemah, terutama pengelolaan akan kekayaan dan keragaman budaya.

Pembangunan bidang kepariwisataan dititikberatkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat bagi tercapainya kemakmuran. Sebenarnya kecenderungan dunia kepariwisataan global semakin membaik dan telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hal ini ditunjukan dengan pertumbuhan pangsa pasar wisata dunia yang bergeser dari benua Eropa dan Amerika ke benua Asia sebagai the new emerging market.

Buku Laporan Tahunan ini adalah gambaran pengejawantahan program Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam suatu integrasi industri yang bergerak selaras, sepadan dan seimbang dalam waktu satu tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2008. Dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan penggunaan dana serta sarana/fasilitas.

Profil Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan latar belakang dan landasan pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka telah tergambar bangsa Indonesia dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional yang merupakan salah satu penjabaran dari tujuan dan sasaran Pembangunan Nasional sesuai dengan RPJMN. Berbagai dasar pemikiran telah dirumuskan sebagai rambu-rambu di dalam Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan Nasional pada masa mendatang yang penuh dengan harapan dan tantangan, yang harus dipedomani oleh insan kebudayaan dan kepariwisataan untuk lebih berperan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berencana dan berkesinambungan.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang merupakan salah satu pelaku pembangunan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan nasional merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

1) Visi

"Terwujudnya jatidiri bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka multikultural, kesejahteraan rakyat dan persahabatan antar bangsa."

2) Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman terhadap tugas pokok dan fungsi Departemen yang berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang transfaran dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan masyarakat, maka Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai misi sebagai berikut:

- Saporan Tanunan 20
- (a) Melakukan pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang berlandaskan nilai luhur;
- (b) Mendukung pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata yang berdaya saing global;
- (c) Melakukan pengembangan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata;
- (d) Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan akuntabel.

2. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor : PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata:

Pasal 1

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
- 2) Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 3) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- 4) Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
- 5) Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pariwisata Menurut Renstra 2005 - 2009

Tujuan Pembangunan Pariwisata 1.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ialah:

- Meningkatnya dukungan penyelenggaraan kebudayaan dan kepariwisataan;
- 2) Meningkatnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan;
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya kebudayaan dan kepariwisataan.

2. Sasaran Pembangunan Pariwisata

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ialah:

- 1) Terwujudnya pedoman, norma, kriteria, standar dan prosedur untuk mendukung pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan;
- 2) Meningkatnya kegiatan perintisan, bimbingan dan supervisi pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan;
- 3) Meningkatnya pemberian peluang kemudahan dan bantuan dalam mendorong pembangunan kebudayan dan kepariwisataan;
 - 4) Meningkatnya kerjasama dalam dan luar negeri di bidang kebudayaan dan kepariwisataan;
 - 5) Meningkatnya kualitas, kuantitas dan manfaat penelitian dan pengembangan, sistem informasi serta dukungan ketersediaam sumber daya manusia;
 - 6) Meningkatnya pengawasan, pengendalian, koordinasi dan kerjasama lintas sektor, wilayah dan lembaga.

Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Parwisata Zahun 2008

1. Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata

Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2006-2009 diarahkan pada 4 (empat) kebijakan, yaitu:

- 1) Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
- 2) Meningkatnya efektivitas peran sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata;
- 3) Memantapkan kerjasama dalam dan luar negeri di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- 4) Memantapkan manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata secara lebih terfokus telah diuraikan sasaran pembangunan dan pariwisata yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2005-2009 yang telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisataan Nasional untuk tahun 2005-2009.

2. Kebijakan Pembangunan Kebudayaan 2008

Dalam bidang Kebudayaan disebutkan sebagai berikut:

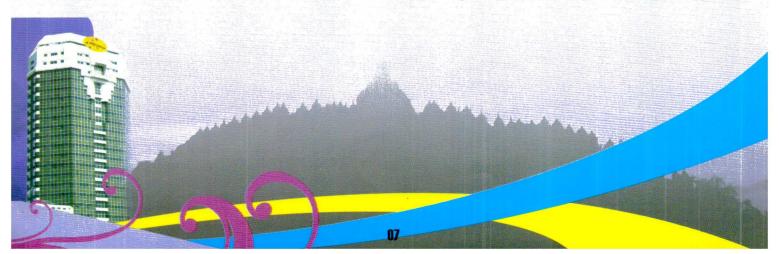
- Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan sehingga memiliki ketahanan dalam menghadapi pengaruh budaya yang negatif;
- Terwujudnya industri dan karya budaya yang mengacu pada budaya bangsa, dan perlindungan hukum individual dan komunal;
- Terwujudnya sikap saling menghargai dan menghormati di atara berbagai komunitas budaya untuk memperkukuh ikatan bangsa.

Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Parwisata Zahun 2008

3. Kebijakan Pembangunan Pariwisata 2008

Dalam bidang Pariwisata diuraikan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya pariwisata nusantara yang dapat mendorong cinta tanah air;
- 2) Meningkatnya pemerataan dan keseimbangan pengembangan destinasi pariwisata yang sesuai dengan potensi masing-masing daerah;
- 3) Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian nasional;
- 4) Meningkatnya produk pariwisata yang memiliki keunggulan kompetitif;
- 5) Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.



Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008

Arah kebijakan dalam Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur dijabarkan ke dalam program-program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini bertujuan untuk memperkuat jati diri bangsa (identitas nasional) dan memantapkan budaya nasional. Tujuan tersebut dicapai antara lain melalui upaya memperkokoh ketahanan budaya nasional sehingga mampu menangkal penetrasi budaya asing yang bernilai negatif dan memfasilitasi proses adopsi dan adaptasi budaya asing yang bernilai positif dan produktif. Di samping itu, diupayakan pula pembangunan moral bangsa yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, gotong-royong, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu dan tanggungjawab. Tujuan tersebut dilaksanakan pula melalui pengarusutamaan nilai-nilai budaya pada setiap aspek pembangunan.

Kegiatan pokok yang akan ditempuh antara lain adalah aktualisasi nilai moral dan agama, revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal yang bernilai luhur termasuk di dalamnya pengembangan budaya maritim, dan transformasi budaya melalui adopsi dan adaptasi nilai-nilai baru yang positif untuk memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa, seperti: orientasi pada peningkatan kinerja, budaya kritis, akuntabilitas dan penerapan iptek.

2. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini bertujuan untuk menciptakan keserasian hubungan antarunit sosial dan antarbudaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman konflik sekaligus memperkuat NKRI.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain adalah:

- 1) Pelaksanaan dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis;
- 2) Pengembangan pendidikan multikultural untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat;
- 3) Pengembangan berbagai wujud ikatan kebangsaan antara lain melalui pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan akses transportasi dan komunikasi lintas daerah dan lintas budaya;
- 4) Pelestarian dan pengembangan ruang publik untuk memperkuat modal sosial; serta
- 5) Peningkatan penegakan hukum untuk menciptakan rasa keadilan antarunit budaya dan antarunit sosial.

3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini bertujuan untuk meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (tangible) maupun tidak kasat mata (intangible).

Kegiatan pokok yang akan ditempuh antara lain:

- 1) Pelestarian kekayaan budaya yang meliputi sejarah, kepurbakalaan, dan benda cagar budaya;
 - 2) Pengembangan sistem informasi dan database bidang kebudayaan antara lain peta budaya dan dokumen arsip negara;
 - 3) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola kekayaan budaya;
 - 4) Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembaga-lembaga yang mengelola kekayaan budaya sehingga memenuhi

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008

- 5) Pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya, misalnya melalui pengembangan film kompetitif, dan pengembangan pola insentif;
- 6) Review peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan kekayaan budaya; dan
- 7) Transkripsi dan transliterasi naskah-naskah kuno

4. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan destinasi wisata dan aset-aset warisan budaya menjadi obyek daya tarik wisata yang atraktif dengan pendekatan profesional, kemitraan swasta, pemerintah, dan masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan serta mendorong investasi. Untuk mewujudkan tujuan di atas, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan adalah:

- 1) Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata melalui penyederhanaan perizinan dan insentif perpajakan bagi investor.
- Mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan di setiap propinsi (one province, one primary tourism destination) secara bersama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;
- 3) Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata;
- 4) Peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya sebagai obyek daya tarik wisata yang kompetitif.
- 5) Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih dan sarana kesehatan); dibutuhkan.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008

- 6) Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata);
- Pemberian perhatian khusus kepada pengembangan kawasan ekowisata dan wisata bahari, terutama di lokasi-lokasi yang mempunyai potensi obyek wisata alam bahari yang sangat besar;
- 8) Pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui:
 - (a) Terbangunnya komitmen nasional agar sektor-sektor di bidang keamanan, hukum, perbankan; perhubungan, dan sektor terkait lainnya dapat memfasilitasi berkembangnya kepariwisataan terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki destinasi pariwisata unggulan;
 - (b) Harmonisasi dan simplifikasi perangkat peraturan baik di tingkat pusat, daerah dan antara pusat dan daerah;
 - (c) Memformulasi, menerapkan, dan mengawasi standar industri pariwisata yang dibutuhkan.

5. Program Pengembangan Pemasaran

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ditujukan untuk menciptakan promosi pariwisata yang efektif dengan pendekatan profesional, kemitraan antara swasta, pemerintah, dan masyarakat dan memperkuat jaringan kelembagaan. Untuk mewujudkan tujuan di atas, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008

- Optimalisasi kegiatan pameran baik yang bertaraf nasional maupun internasional baik di dalam maupun di luar negeri baik pada negara-negara mitra pariwisata potensial maupun negara-negara yang memilki kedekatan secara historis dan kultural dengan Indonesia, seperti Asia Timur, India dan Timur Tengah;
- 2) Fasilitasi pemasaran paket-paket wisata dan jaringan distribusinya;
- Fasilitasi kerjasama pemasaran antar negara, antar pusat dengan daerah, dan antar pelaku industri pariwisata dalam bentuk aliansi strategis, seperti kerjasama antar travel agent dan antar tour operator, antara pelaku pariwisata dengan perusahaan transportasi udara, laut dan darat;
- 4) Peningkatan sadar wisata di kalangan masyarakat, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai calon wisatawan;
- 5) Memotivasi dan memberikan kemudahan bagi perjalanan wisata domestik;
- 6) Pengembangan sistim informasi yang efisien dan efektif

6. Program Pengembangan Kemitraan

Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama antara Pemerintah (pusat-kabupaten/kota)-swasta-dan masyarakat dan pelaku industri budaya dan pariwisata di dalam maupun di luar negeri dalam bidang penelitian, sumber daya manusia, dan kelembagaan dan sekaligus mengembangkan pariwisata yang berbasis budaya. Dalam rangka pencapaian tujuan di atas, kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008

- 1) Pembangunan dan perkuatan jaringan database dan informasi kebudayaan dan kepariwisataan, baik di dalam negeri (antara pusat-propinsi, dan kabupaten/kota) dan luar negeri termasuk pengembangan SDM-nya;
- Pengembangan Litbang dan pengembangan SDM dalam bentuk joint research, dualtraining serta aliansi strategis terutama dengan lembaga sejenis di luar negeri.

7. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

Program ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan operasional kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan melakukan kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Data dan Informasi;
- 2) Pengembangan Sistem dan Aplikasi Keuangan; dan
- 3) Peningkatan Pelayanan Umum dan Kehumasan.

8. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program ini ditujukan untuk mendorong terwujudnya manajemen pembangunan kebudayaan dan pariwisata dan keterpaduan gerak antar *stakeholders* serta perlaku pembangunan lainnya dalam mendorong pembangunan kebudayaan dan pariwisata nasional melalui:

- 1) Pengembangan Perencanaan dan Hukum;
 - 2) Pembinaan, Pengembangan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana;
 - 3) Peningkatan Kerjasama Luar Negeri Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4) Peningkatan Kemampuan Pegawai Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5) Pendukungan Kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata.

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008

9. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Program pengawasan aparatur negara untuk mewujudkan good governance dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata melalui kegiatan-kegiatan pokok antara lain:

- 1) Peningkatan Efektivitas dan Efesiensi Pengawasan;
- 2) Penataan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- 3) Peningkatan Kualitas dan Integritas SDM Inspektorat Jendral;
- 4) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5) Pelaksanaan dan Koordinasi, Pelayanan Teknis dan Administrasi pengawasan aparatur negara.

SEKRETARIAT JENDERAL

Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen. Dalam melaksanakaan tugas Sekretaris Jenderal dibantu oleh 5 Kepala Biro dan 3 Kepala Pusat yaitu : Kepala Biro Perencanaan dan Hukum, Kepala Biro Kepagawaian dan Organisasi, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Kepala Biro Umum, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kepala Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan, dan Kepala Pusat Informasi dan Humas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- 1. Koordinasi kegiatan Departemen;
- Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;
- 3. Penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Departemen lain Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga lain yang terkait;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal pada tahun 2008 meliputi:

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Berdasarkan surat Menpan tanggal 31 Januari 2008 Nomor B/308/M.PAN/01/2008 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah dilakukan evaluasi atas Sistem AKIP di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar). Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yaitu: perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan capaian. Hasil evaluasi menunjukan bahwa Depbudpar memiliki nilai 52,18 dan menempati peringkat 8 dari 70 instansi pemerintah pusat yang dievaluasi.

2. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Depbudpar

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Depbudpar telah menerbitkan Peraturan Menbudpar Nomor PM.47/HK.001/MKP/2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama yang bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

3. Review Rencana Strategis (Renstra) Depbudpar Tahun 2005 - 2009

Review Renstra dititikberatkan pada penyempurnaan uraian sasaran yang semula hanya 6 (enam) butir diubah menjadi 10 butir yang lebih menggambarkan tugas pokok dan fungsi Depbudpar lima tahun ke depan. Renstra Depbudpar mengacu kepada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.46/KP.403/MKP/2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Perubahan Pertama atas Rencana Strategis Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2005 - 2009.

4. Forum Komunikasi Perencanaan Kebudayaan dan Pariwisata

Dalam upaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2009, perlu adanya pembahasan yang lebih fokus, terencana dan terukur dalam bentuk forum diskusi tentang pembangunan kebudayaan dan kepariwisataan yang dimaksudkan untuk memudahkan pemilihan prioritas dan bentuk kerjasama sinergi.

5. Forum Diskusi Kebudayaan dan Kepariwisataan

Forum ini merupakan sarana komunikasi di antara stakeholders untuk memetakan permasalahan nasional, lokal dan aktual yang terkait dengan kebudayaan dan kepariwisataan bertujuan untuk menggali informasi sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMN II tahun 2010 – 2014 bidang kebudayaan dan pariwisata ditinjau dari prosfektif stakeholders pusat dan daerah, terutama yang berkaitan dengan pokok-pokok kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

6. Pembahasan Revisi RUU No. 9 tentang Kepariwisataan

Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 17 Desember 2008 telah disetujui RUU tentang Kepariwisataan untuk disahkan menjadi UU, selanjutnya DPR akan menyampaikan kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-undang.

- 7. Penyempurnaan (revisi) terhadap UU No. 8 tahun 1992 tentang Perfilman.

 Sudah dihasilkan Naskah Akademik dan Draft Revisi Undang-undang, dan untuk memperkaya substansi telah dilakukan sosialisasi dengan peranaktif para pemangku kepentingan perfilman.
- 8. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2526 K/Pdt/2002 tanggal 27 Agustus 2004 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 PK/Pdt/2007 tanggal 3 April 2008, tanah yang terletak di Jl. Dr. Setiabudi No. 186 Bandung seluas 46.675 m2 berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 1992 adalah milik STP Bandung.



9. Di Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Kegiatan-kegiatan pada tahun 2008 dalam bidang perencanaan dan pengembangan pegawai:

- 1) Program Pasca Sarjana Museologi
 - (a) Angkatan I lulus 20 Magister Museologi
 - (b) Angkatan II dan III berjumlah 54 orang.
- 2) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Tahun 2008 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mendapat formasi untuk Kantor Pusat sebanyak 101 orang dan untuk Kantor UPT sebanyak 106 orang

3) Pembinaan Mental Pegawai

Diselenggarakan di Galeri Nasional Indonesia dengan peserta 230 orang, dengan nara sumber dari Menpan dan BKN, sekaligus mensosialisasikan :

- (a) Kode Etik, Permen No. PM.43/KP.502/MKP/2008;
- (b) Pedoman Evaluasi Budaya Kerja, Permen No. 44/KP.502/MKP/2008;
- (c) Pedoman Budaya Kerja, Permen No. PM.45/KP.502/MKP/2008;
- (d) Disiplin PNS, PP No. 30 tahun 1980.
- 4) Pengembangan Kualitas Pegawai
 - (a) Pelaksanaan Ujian Dinas 167 orang dan Penyesuaian Ijasah 17 orang;
 - (b) Pelaksanaan Kegiatan Pembekalan Prapurnabakti untuk berwira usaha sebanyak 49 orang.
- 5) Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan/Kehormatan
 - (a) Pemberian Tanda Jasa;

Ada 2 orang Pejabat Eselon I yang menerima Tanda Kehormatan/Penghargaan: yaitu Dr. Sapta Nirwandar mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dan Ir. Firmansyah Rahim, MM mendapatkan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan.

- (b) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya;

 Dalam rangka memberikan motivasi kepada para pegawai Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, telah dilaksanakan pemberian penghargaan SatyaLancana Karya Satya untuk penghargaan 10 tahun sebanyak 105 orang, penghargaan 20 tahun sebanyak 198 orang dan penghargaan 30 tahun sebanyak 60 orang.
- (c) Penghargaan dan Pemberian Cinderamata dari Menbudpar kepada para Purnabakti kantor pusat yang pensiun tahun 2006/2007 sebanyak 48 orang.

10. Penataan Organisasi Dan Tata Laksana Depbudpar

- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.35/HK.001/MKP-2008 tentang perubahan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 37/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.
- 2) Pembentukan 3 (tiga) Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) yaitu:
 - (a) BP3 Samarinda;
 - (b) BP3 Ternate;
 - (c) BP3 Gorontalo.

11. Database Pegawai

- 1) Depbudpar telah memiliki Database Kepegawaian dan Scanning Dokumen Kepegawaian yang bisa menyimpan seluruh data sebagai bahan pelaksanaan Administrasi.
- 2) Depbudpar telah melaksanakan persiapan pembuatan Karpeg berbasis elektronik serta perubahan NIP Nasional dilingkup Kantor Pusat dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) di Jakarta.

12. Di Bidang Keuangan;

Dengan diberlakukan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, selain untuk mengantisipasi perubahan standar akuntasi dilingkungan pemerintah, juga untuk menyesuaikan kepada standar akuntansi secara internasional. Dalam rangka mendukung terwujudnya Corporate Good Governance serta penyelenggaraan Negara, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Bidang Keuangan, maka Biro Keuangan dalam Program Kerja Tahun Anggaran 2008 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang strategis, antara lain sebagai berikut:

- Tersusunnya Laporan Keuangan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008.
 Hasil Laporan Interim dari BPK terhadap Laporan Keuangan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk Semester I tahun 2008 belum dapat diyakini kewajarannya atau berpotensi Opini Disclaimer;
- 2) Telah ditunjuk Pembentukan dan Penanggungjawab Unit Akuntansi di lingkungan Depbudpar, yaitu Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-Wilayah) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-Eselon I).
- 3) Telah diselenggarakan kegiatan "Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Instansi TA. 2008".

- 4) Telah diterbitkannya Instruksi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor: IM.38/PS.101/MKP/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Rencana Aksi Peningkatan Opini atas Laporan Keuangan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka mendukung program percepatan peningkatan perubahan opini yang lebih baik.
- 5) Untuk tahun anggaran 2008 telah dilaksanakan Bimbingan dan Ujian Keahlian Sertifikasi Nasional Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan dari Kantor Pusat dan UPT di daerah, dengan jumlah peserta sebanyak 230 orang dengan pelaksanaan kegiatan dibagi dalam tiga tahap:
 - (a) Tahap pertama:

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari UPT di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2008 dengan jumlah peserta sebanyak 80 orang, selanjutnya yang dinyatakan lulus sejumlah 43 orang;

(b) Tahap kedua:

Dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2008 dan diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Staf Pengelola Keuangan dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang dan yang dinyatakan lulus sebanyak 25 orang.

(c). Tahap Ketiga:

Dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2008 dan diikuti oleh para Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Pengadaan dan Staf Pengelola Keuangan dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang dan yang dinyatakan lulus sebanyak 65 orang.

- (d) Posisi sampai akhir tahun 2008:
 - PNS yang telah memiliki sertifikat keahlian nasional pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Departemen Kebudayaan Budpar sebanyak 248 orang.
- 6) Dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan para pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan di lingkungan Biro Keuangan serta menyelesaikan proses penataan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Depbudpar dalam pengelolaan keuangan negara sehingga terciptanya tertib administrasi, maka dilakukan antara lain:
 - (a) Telah dilaksanakan Pembekalan (sosialisasi) dikalangan para pengelola keuangan.
 - (b) Penyusunan Juklak penatausahaan keuangan.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun anggaran 2008 target penerimaan diperkirakan sebesar Rp.10.593.830.000,- namun target penerimaan sampai dengan posisi bulan Desember tahun 2008 sebesar Rp.12.075.413.798,- sehingga terdapat kelebihan penerimaan sebesar Rp.1.481.583.798,-

- 7) Biro Keuangan menyelesaikan proses penataan PNBP di lingkungan Depbudpar berupa usulan penyesuaian tarif dan penyesuaian jenis komponen dari PNBP. Penyelesaian kasus TGR atas nama eks pejabat/pegawai Depbudpar di 4 (empat) daerah di 4 (empat) daerah yang terdapat dalam LHP atas Laporan Keuangan Depbudpar Tahun 2007, saat ini Depbudpar sudah menindaklanjuti kasus tersebut.
- 8) Mengkonsilidasikan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Depbudpar TA. 2008 dengan pagu DIPA yang dialokasikan sebesar Rp 1.078.094.010.000,- yang telah dipergunakan untuk melaksanakan 9 Program Pokok Utama dengan Realisasi Keuangan Posisi sampai dengan 31 Desember 2008 mencapai sebesar Rp 1.022.394.736.801,- atau sebesar 94,83% dari pagu yang dianggarkan.

13. Di Bidang Kerjasama Luar Negeri

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Depbudpar terus meningkatkan kerjasama dengan bangsa-bangsa lain baik dengan memperkokoh kerjasama bilateral dalam pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan, maupun dengan meningkatkan peran aktif Depbudpar dalam organisasi-organisasi kebudayaan atau pariwisata di lingkup sub-regional (ASEAN dan kawasan pertumbuhan), maupun dalam organisasi kebudayaan atau pariwisata di kawasan Asia Pasifik (Regional), serta organisasi internasional dalam lingkup multilateral. Posisi strategis Indonesia dalam organisasi-organisasi internasional antara lain sebagai anggota: (1) Dewan Eksekutif UNWTO;(2.) World Committee on Tourism Ethic UNWTO;(3.)Komite Program UNWTO;dan (4.) Board Of Director (BOD) PATA.



14. Biro Umum

- 1)Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2008 diselenggarakan pada 16-17 Januari 2008 di Hotel Borobudur, Jakarta dengan tema "Pemantapan Pelaksanaan Program Kebudayaan dan Pariwisata 2008-2009" yang merupakan langkah strategis dalam rangka menyukseskan Visit Indonesia Year 2008.
- 2) Rehabilitasi Gedung Film Lantai 1, 5 dan 8 di jalan MT. Haryono Kavling 47-48, Jakarta Selatan. Upaya meningkatkan pelayanan, kenyamanan dan suasana kerja yang kondusif bagi pegawai.
- 3) Rekondisi Balairung dan Panggung Gedung Sapta Pesona.
 Upaya meningkatkan kenyamanan, keindahan dan daya tarik telah dilaksanakan renovasi/rekondisi balairung.
- 4) Pengadaan Ruang dan Fasilitas Fitnes.

 Upaya meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani bagi para pejabat dan pegawai.
- 5) Penataan Usahaan Barang Milik Negara.

15. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM di Depbudpar

Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan jenjang karir yang dilakukan antara lain melalui:

Diklat Struktural;

Diklat Kepemimpinan Tingkat II (3 orang), Diklat Kepemimpinan Tingkat III (30 orang) dan Diklat Kepemimpinan tingkat IV (30 orang).

2) Diklat Teknis;

Pelatihan strategy Alignment & Values bagi Pejabat Eselon II, Pelatihan Presentation and Negotiation Skill bagi pejabat Eselon II dan III, Pelatihan Pengembangan Diri bagi Pejabat Eselon IV dan Staf, Diklat Teknis Pariwisata Tingkat Dasar dan Lanjutan bagi Pejabat Eselon IV dan Staf, Pelatihan Keprotokolan dan Pergaulan Antar Bangsa bagi Pejabat eselon IV dan Staf, Diklat Penyusunan Rencana dan Anggaran bagi Pejabat Eselon IV dan Staf, Diklat Bahasa Inggris, Mandarin dan Jepang bagi pejabat eselon III, IV dan Staf, Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III bagi 330 orang.

16. Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM di Luar Depbudpar

Antara lain: Training of Trainer (TOT) Outbound bagi Polisi Resort Solok, Padang, Sumatera Barat. TOT yang dilaksanakan pada tanggal 19-22 oktober 2008 di Base Camp Tanah Tingal, Diputat, diikuti oleh 26 orang. Para peserta diharapkan dapat menjadi instruktur di daerahnya.

17. Bidang Pengelolaan Data

Melakukan kegiatan pendataan di bidang kebudayaan antara lain pendataan pengunjung museum, perpustakaan, dan tempat bersejarah, serta pendataan Benda Cagar Budaya (BCB). sedangkan di bidang Pariwisata meliputi pendataan wisman, wisnus, dan wisnas, serta workshop Neraca Satelit Pariwisata Nasional (Nesparnas). Diantara kegiatan di bidang pariwisata tersebut adalah **Pendataan Profil Wisatawan Mancanegara** (Passenger Exit Surver – PES) untuk mengetahui rata-rata lama tinggal, pengeluaran wisman, opini dan persepsi wisman selama berada di Indonesia, Neraca Perjalanan (Travel Balance) dalam Neraca Pembayaran Indonesia (Balance of Payment), Neraca Satelit Pariwisata (Tourism

Satellite Account), serta untuk

penyusunan strategi kebijakan dan program pariwisata Indonesia. Berdasarkan hasil Pendataan Profil Wisman 2008 didapat rata-rata pengeluaran wisman per kunjungan sejumlah US\$ 1.178,54, yang merupakan rata-rata pengeluaran dalam 3 tahun terakhir.

18. Bidang Pengelolaan Sistem Jaringan

Pada tahun 2008, melakukan penataan pada sistem jaringan yang ada pada lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata guna mengoptimalkan kinerja sistem jaringan. Penataan sistem jaringan tersebut diantaranya melakukan pemindahan ruang server dari lantai 24 ke lantai 21. Melakukan perubahan topologi jaringan dari topologi BUS ke STAR (menggunakan kabel fiber optik pada sisi backbone) dan penambahan node baru di beberapa lantai. Melakukan reenginering Intranet (www.budpar.net) dan pembangunan Mail Server (webmail.budpar.go.id) dengan menggunakan Microsoft Exchange.

19. Pembinaan Informasi Publik Dilaksanakan Melalui Berbagai Kegiatan

1) Hubungan Media, dengan rangkaian aktivitas seperti Press Conference, Press Briefing, Press Gathering, Press Appreciation, Media Visit, Media Trip. Untuk mengoptimalkan aktivitas PR-ing Depbudpar, maka terus ditingkatkan kerjasama dengan media cetak dan elektronik, seperti placement artikel, advetorial, feature, di surat kabar harian maupun majalah/tabloid,talkshow/interview/dialog di stasiun TV dan Radio, menjalin kerjasama dengan blogger dan LKBN Antara dalam penyebarluasan informasi ke seluruh dunia, serta memanfaatkan sarana TV display di taksi.



- 2) Hubungan Antar Lembaga, dengan rangkaian aktivitas mendukung kemitraan dengan Legislatif dalam pelaksanaan Rapat Kerja (RAKER), Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kunjungan Kerja ke Daerah (KUNKER), bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga kehumasan seperti BAKOHUMAS, PERHUMAS, PR Society.
- 3) Informasi dan Publikasi, dengan rangkaian aktivitas antara lain: menerbitkan berbagai bahan-bahan publikasi seperti Laporan Tahunan, Buku Kinerja Menbudpar, Membuat Kalender Meja, Membuat Buku Kerja, Membuat Buku Laporan Media Monitoring, menerbitkan In-House Magazine RAGAM PESONA, Memanfaatkan sarana Majalah Dinding, Menerbitkan berita/release secara rutin setiap hari, Memberikan respon kepada masyarakat melalui e-mail, Pembuatan dan Penggandaan dokumentasi berupa foto, dan film, Membangun Ruang Media Monitoring stasiun TV, Pengadaan sarana dan peralatan Kehumasan, penggandaan CD Profil Depbudpar, Membangun ruang multi media dan mini studio, Melengkapi sarana di Press Room. Dalam 2 tahun terakhir, Pusat Informasi dan Humas mendapatkan penghargaan sebagai Juara Pertama Kategori Audio Visual oleh BAKOHUMAS Tingkat Nasional.

EVALUASI

Sekretariat Jenderal sebagai unit pelaksana yang lebih memberikan dukungan dan memfasilitasi kelancaran kinerja Satuan Kerja di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan aktivitas Tahun Anggaran 2008 dengan baik.

Secara keseluruhan program, kegiatan dan aktivitas yang telah direncanakan oleh Biro Perencanaan dan Hukum telah dilaksanakan dengan baik. Adapun hambatan kecil yang dialami antara lain kegiatan yang dilaksanakan bekerjasama dengan mitra kerja (supra sistem) sering mengalami hambatan masalah penyesuaian waktu pelaksanaan. Untuk itu pada waktu yang akan datang diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan sebelumnya dikoordinasikan terlebih dahulu dengan supra sistem.

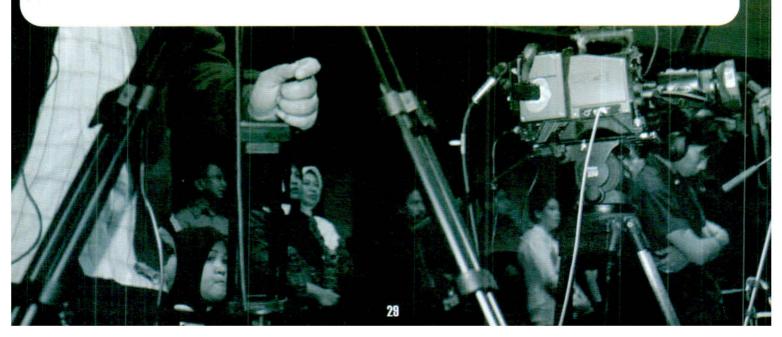
Dalam bidang Keuangan telah dilaksanakan Penyelenggaraan bidang Pengelolaan Keuangan Negara dalam program kegiatan yang bersifat Bimbingan Teknis, yaitu:(1) Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi Instansi (SAI); (2) Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (3) Bimbingan Teknis dalam bidang Pengelolaan Keuangan Negara.

Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri Departemen Kebudayaan dan Pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperoleh manfaat, dalam hal ini bantuan-bantuan teknis maupun finansial guna mempercepat perkembangan kebudayaan dan kepariwisataan di Indonesia. Perlu peningkatan komitmen dalam pemanfaatan atau tindak lanjut hasil-hasil kerjasama dari masing-masing unit teknis.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai juga telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis sepanjang tahun 2008 dalam rangka peningkatan kualitas pegawai di lingkungan Depbudpar dengan baik. Namun demikian masih terdapat kekurangan misalnya banyak peserta diklat, khususnya diklat teknis yang bukan bertujuan untuk menambah ilmu dan wawasan tetapi hanya untuk mengisi waktu luang saja, mengingat keikutsertaan pegawai pada diklat teknis belum dijadikan pertimbangan untuk menduduki jabatan struktural. Untuk itu, seyogyanya diklat teknis (substantif) setara dengan diklat struktural sehingga dapat terbina pola karir PNS yang benar (diklat teknis menunjang diklat struktural).

Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Jaringan telah melaksanakan pembangunan infrastruktur jaringan dan penataan node baru, pembangunan exchange mail untuk komunikasi surat elektronik, decision support system untuk pimpinan yang dapat diakses dengan menggunakan windows mobile; di samping itu, telah dilakukan pendataan profil wisman yang digunakan untuk mengetahui pengeluaran wisman, pendataan wisnas untuk mengetahui orang Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, pendataan wisnus dan pengolahan data Nesparnas bekerja sama dengan BPS. Di bidang kebudayaan juga telah dilakukan pendataan pengunjung museum, pendataan pengunjung monumen dan tempattempat bersejarah, dan pendataan perpustakaan.

Pusat Informasi dan Humas (PIH) telah melaksanakan berbagai kegiatan yang meliputi peningkatan pelayanan informasi dan publikasi baik eksternal maupun internal, peningkatan intensitas hubungan dengan media massa dan lembaga pemerintah/non pemerintah. Sarana ditingkatkan dengan membentuk ruang monitoring media dan ruang multi media/mini studio. Pendokumentasian kegiatan pimpinan terus ditingkatkan dan dikelola dengan lebih baik. PIH bangga dengan keberhasilannya mempertahankan prestasi untuk yang kedua kalinya dengan keberhasilannya mempertahankan prestasi untuk yang kedua kalinya dengan memenangkan predikat pertama Anugerah Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) 2008 kategori profil Lembaga Audio Visual Instansi Pemerintah.





Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film

Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film (NBSF) dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang nilai budaya seni dan film. Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 6 orang pejabat eselon II yaitu: Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur Tradisi, Direktur Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa, Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktur Kesenian dan Direktur Perfilman.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film menyelenggaran fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang nilai budaya, seni dan film;

 Pelaksanaan kebijakan di bidang tradisi, pembangunan karakter dan pekerti bangsa, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesenian, serta film berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Penyusunan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang tradisi, pembangunan karakter dan pekerti bangsa, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kesenian, serta film;

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tradisi, pembangunan karakter dan pekerti bangsa, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, yaitu:

1. Gelar Budaya Spiritual;

Diselenggarakan pada tanggal 29 Mei 2008 di Malang, Jawa Timur dan dibuka oleh Gubernur Jawa Timur, dihadiri Dirjen Nilai Budaya Seni dan Film.

2. Sistematisasi ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Dilaksanakan di Medan, Bali, dan Yogyakarta pada bulan Februari sampai dengan Desember 2008.

 Sosialisasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Dilaksanakan di Jawa Barat, pada tanggal 17 April 2008 dan di Jawa Tengah, tanggal 29 April 2008.

- 4. Monografi Budaya Spiritual Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dilaksanakan di Jawa Timur dan NTT pada bulan April s.d. Agustus 2008. .
- Sarasehan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 Dilaksanakan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta pada tanggal 7 s.d. 9 Januari 2008.
- Pembinaan Pelaku Budaya Spiritual bagi Generasi Muda
 Dilaksanakan di Bali dan Jawa Tengah pada Bulan Mei dan Juni tahun 2008.
- 7. Pemberdayaan Komunitas Adat

Dilaksanakan di Lembah Nyiur, Puncak, Jawa Barat pada tanggal 10 s.d 12 April 2008.



8. Workshop Pemberdayaan Komunitas Adat

Dilaksanakan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pada tanggal 11 s.d 13 Juni 2008.

9. Monografi Komunitas Adat

Pendataan dan pengindentifikasian komunitas adat yang mengambil lokasi di Palembang, Bandung, Banten dan Bangka Belitung pada bulan April - September 2008 (tahap penulisan).

10. First Indonesia Expo Central East Europe

Dilaksanakan di Polandia pada tanggal 7 sampai dengan 10 Mei 2008 dan Direktorat Perfilman sebagai salah satu partisipan.

11. Pesta Permainan Tradisional Anak

Dilaksanakan pada tanggal 4-6 Juli 2008 dibuka oleh Walikota Pangkal Pinang dan diikuti oleh 100 anak yatim piatu/panti asuhan dan anak-anak lain di Kota Pangkal Pinang.

12. Sosialisasi Pedoman Permainan Gasing Tingkat Nasional

Dilaksanakan dari bulan Mei s.d. Juli 2008 dan di 8 daerah yaitu; Purworejo, Pontianak, Muntok, Bandar Lampung, Lamongan, Tanjungpinang, Selong, dan Ambon.

13. Festival Budaya Nusantara (Festival Budaya Masyarakat Peladang)

Dilaksanakan pada tanggal 19 s.d. 24 Agustus 2008 di Jakarta.

14. Gelar Budaya Lampung

Dilaksanakan di Bandar Lampung pada tanggal 18 s.d. 20 Juni 2008.



15. Pemberdayaan Pasar Tradisonal (Kajian Pasar Tradisional Enam Negara Asean)

Kegiatan ini merupakan kegiatan studi banding mengenai pasar tradisional yang ada di Negara Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand, Vietnam, Kamboja pada bulan April-Juli 2008.

16. Gita Bahana Nusantara

Dilaksanakan tanggal 15 Agustus 2008, pada sidang Paripurna DPR/MPR-RI, tanggal 17 Agustus 2008 pada upacara detik-detik proklamasi di istana merdeka, tanggal 18 Agustus 2008 Audiensi dengan Presiden RI di JI-Expo Kemayoran, dan tanggal 19 Agustus 2008 pada acara Pawai Budaya.

17. Perkemahan Budaya Sejawa dan Bali

Dilaksanakan di Karanganyar, Surakarta pada 21 – 25 Juli 2008.

18. Jelajah Budaya

Dilaksanakan di beberapa kota di Jawa Barat antara lain Kerawang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Sumedang, Garut dan Bandung pada tanggal 15-18 Juni 2008.

19. Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Budaya Disipiln

Dilaksanakan di Jawa Timur dan Palembang.

20. Pawai Budaya Nusantara

Dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2008, dilepas oleh Bapak Presiden ditandai dengan pemukulan alat musik kentongan di tribun kehormatan utama.



21. Pendukungan Pengelolaan Taman Budaya Daerah

Untuk 10 Taman Budaya Daerah berupa pendukungan teknis dan 24 Taman Budaya Daerah berupa pendukungan peralatan yang diserahkan secara simbolik di Bandung pada tanggal 23 Juli 2008.

22. Lomba Lukis dan Cipta Puisi Anak-Anak

Diselenggarakan di Istana Cipanas pada tanggal 24 Agustus 2008 merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya.

23. Kampanye Hidup Rukun Dalam Keragaman Budaya

Kegiatan ini diselenggarakan di Polewali 14 – 17 Juli 2008.

24. Kongres Kebudayaan

Kegiatan ini diselenggarakan di Bogor pada tanggal 10–12 Desember 2008, bertujuan untuk memfasilitasi pemetaan dan pembahasan gagasan, apresiasi, minat dan partisipasi bangsa Indonesia khususnya tokoh masyarakat, budayawan, pakar budaya, ilmuwan, dan pemerintah, akan orientasi budayanya demi mambangun kebudayaan nasional yang berbasis pluralisme dan multikulturalisme, dan menggali berbagai pendekatan budaya yang kompeten untuk menjawab tantangan zaman khususnya dalam arus globalisasi.

25. Pemberian Anugerah Kebudayaan

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2008 di Bogor.



26. Festival Film Indonesia (FFI)

FFI tahun ini dilaksanakan di kota Bandung pada tanggal 12 Desember 2008.

27. Pengiriman Misi Kesenian Ke Bulgaria

Ditjen Nilai Budaya, Seni dan Film mengirimkan tim kesenian Indonesia ke Bulgaria.

28. Pengiriman Pengrajin Batik ke Macao

Dalam rangka pameran "World Heritage Travel Expo" yang diadakan pada tanggal 26-28 Nopember 2008 di Hotel Venetian Macao, pengrajin-pengrajin batik yang tergabung dalam wadah Yayasan Batik Indonesia turut berpartisipasi dalam pameran tersebut dan Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film yang turut melestarikan batik untuk itu memberikan dukungan dengan memfasilitasi pengrajin-pengrajin tersebut.

EVALUASI

Evaluasi secara umum keseluruhan kegiatan Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film tahun 2008 telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan realisasi keuangan mencapai 97,31 %, atau terserap Rp. 122.851.192.143,00 dari pagu sebesar Rp. 126.248.350.000,00 dan sisa anggaran sebesar Rp. 3.397.157.857,00. Perbedaan pagu dibanding dengan pagu awal (semula Rp. 143.810.519.000,00 menjadi Rp. 126.248.350.000,00) dikarenakan adanya kebijakan penghematan anggaran dari Pemerintah sebesar 10% dan untuk Ditjen NBSF penghematan tersebut sebesar 12,21% atau Rp. 17.562.169.000,00.

Dilihat dari capaian sasaran tersebut di atas, maka secara umum kinerja Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film tahun 2008 dapat dinyatakan berhasil.

Adapun permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pada kurun waktu satu tahun tersebut diantaranya adalah:

- Proses pengalihan sekaligus pencairan bintang atas kegiatan dengan MAK Bansos baru disetujui pada bulan September 2008, demikian juga dengan kegiatan-kegiatan baru yang merupakan hasil revisi DIPA (APBN-P).
- 2. Kegiatan pendukungan pengembangan nilai budaya daerah, yang sedianya akan dilaksanakan dengan penerbitan SKPD ternyata langkah tersebut tidak dimungkinkan, sehingga baru dapat dilaksanakan pada akhir semester II.
- 3. Adanya pengurangan pagu anggaran (pemotongan) sebagai langkah penghematan oleh pemerintah, mengharuskan adanya penyesuaian rencana sehingga mengurangi target sasaran.
- Adanya beberapa kegiatan yang semula belum direncakanan dari awal, namun karena sangat penting dan menjadi prioritas maka harus dilaksanakan sehingga memerlukan penyusuaian rencana (revisi POK/DIPA).



Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala

Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala (Sepur) dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Sejarah dan Purbakala. Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala dibantu oleh 5 orang pejabat Eselon II yaitu: Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur Nilai Sejarah, Direktur Geografi Sejarah, Direktur Peninggalan Bawah Air, Direktur Peninggalan Purbakala dan Direktur Museum.

Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Menyiapkan perumusan kebijakan Departemen di bidang Sejarah dan Purbakala.

 Pelaksanaan kebijakan di bidang Nilai Sejarah, Geografi Sejarah,
 Peninggalan Bawah Air, Peninggalan Purbakala dan Museum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang Nilai Sejarah, Geografi Sejarah, Peninggalan Bawah Air, Peninggalan Purbakala, dan Museum.

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk Nilai Sejarah, Geografi Sejarah, Peninggalan Bawah Air, Peninggalan Purbakala, dan Museum.

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.



Program pembangunan yang dikelola Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala adalah Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya penanaman kekayaan budaya Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melalui kegiatan-kegiatan seperti : (1) Pengembangan Nilai Sejarah, (2) Pengembangan Geografi Sejarah, (3) Pengelolaan Peninggalan Bawah Air, (4) Pengelolaan Peninggalan purbakala, (5) Pengeloaan Museum, (6) Pengembangan Pemahaman Budaya, (7) Pendukungan pengelolaan Museum, (8) Pendukungan Pengembangan Kekayaan Budaya Daerah, dan (9 Pelaksanaan Koordinasi, pelayanan teknis, dan Administrasi Kekayaan Budaya Daerah.

Untuk itu maka diperlukan strategi pengelolaan kekayaan budaya yang baik, tepat guna dan berhasil guna, termasuk dalam hal ini adalah berkaitan dengan penyusunan rencana dan program dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara bertahap dan dengan jangka waktu tertentu, baik yang menyangkut bidang perlindungan, pengembangan, maupun pemanfaatannya yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Bidang Sejarah meliputi:

1. Sosialisasi Pedoman Penulisan Sejarah Lokal

Dilaksanakan di Hotel Banjarmasin Internasional Pada tanggal 22 - 25 April 2008 dengan tema "Menggali Potensi Daerah Melalui Penulisan Sejarah Lokal". .

2. Seratus Tahun Indonesia Bangkit (dalam bentuk Dialog Interaktif Sejarah)

Mengangkat tema "Kilas Balik Satu Abad Gerakan Pemuda Indonesia", dilaksanakan di tiga lokasi:

 Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 15-17 Mei 2008 bertempat di Aula Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Arkeologi, Sejarah, dan Nilai Tradisi. Di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta, diselenggarakan pada Rabu, 21 Mei 2008 berlangsung di Auditorium Museum Kebangkitan Nasional.

3) Di Universitas Sriwijaya (UNSRI), Palembang. Dialog Interaktif Kesejarahan diselenggarakan bekerjasama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-UNSRI. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan "Visit Musi" yang dicanangkan Pemprov Sumatera Selatan dan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Workshop Kesejarahan

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi kegiatan Musyawarah Kerja Nasional Pengajaran Sejarah yang dilaksanakan Direktorat Nilai Sejarah pada 11-14 juli 2006 di Surabaya. Untuk tahun 2008 Workshop dilaksanakan di ruang Istambul Hotel Madani Medan pada tanggal 28-31 Mei 2008, dengan tema "Pembelajaran Sejarah dalam Pengembangan Jati Diri Bangsa".

4. Lawatan Sejarah Tingkat Nasional VI

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Bali, pada 14-19 Juli 2008 dengan tema "Puputan di Bali". Peserta sebanyak 150 orang terdiri atas: siswa-siswi SMU terbaik di Indonesia; guru-guru pendamping; para Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional; pakar sejarah dan pendidikan; dan dari Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.

5. Pameran Kesejarahan

Dilaksanakan di Museum Bajra Sandi, Renon, Denpasar, Bali pada tanggal 11 s.d. 13 Juli 2008 dengan Tema "Melalui Puputan mewujudkan Nasionalisme". Pameran dikunjungi + 1.000 Orang yang terdiri dari Masyarakat Umum, Pemerhati Sejarah, Mahasiswa, dan Siswa di Bali.



6. Pengumpulan Sumber Sejarah Tempat Pengasingan Pahlawan Proklamator

Dilaksanakan di 3 (tiga) tempat, yaitu : Bandung, Ende, dan Bengkulu. Kegiatan perekaman difokuskan pada beberapa tempat dan bangunan yang pernah dipergunakan oleh Soekarno sebagai tempat kediaman dan melakukan aktivitas selama berada di tempat pengasingan.

7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Spasial Sejarah

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 – 11 April 2008 bertempat di Hotel Ria Diani, Bogor, diikuti 30 peserta dari 11 BPSNT, Balar Bandung, BP3 dan direktorat-direktorat di lingkungan Ditjen Sepur.

8. Arung Sejarah Bahari III

Arung Sejarah Bahari III ini berlangsung dari tanggal 20-25 April 2008 di Maluku Utara, dengan mengambil tema "Membangun Kembali Peradaban Bahari dengan Menjelajahi Pusat Perdagangan Rempah-Rempah Nusantara", dengan rute Ternate – Bacan – Tidore - Jailolo.

9. Penyusunan Kebijakan Direktorat Geografi Sejarah

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 - 30 Mei 2008 bertempat di Resort Prima Bogor, dengan peserta berjumlah 58 orang yang berasal dari Ditjen NBSF, Bakosurtanal, UI, UGM, Puslitbangbud, Dir. Nilai Sejarah, BPSNT seluruh Indonesia, dibuka oleh Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala.

Workshop Perubahan Lingkungan di Kawasan Wisata Dieng dalam Perspektif Sejarah

Kegiatan dengan tema Menjadikan Dieng Kembali Mentereng dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Juni 2008 bertempat di Hotel Kresna, Wonosobo. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala pada tahun 2008 Kegiatan untuk Bidang Purbakala meliputi:

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelestarian serta Pemanfaatan Peninggalan Bawah Air

Direktorat Peninggalan Bawah Air pada tanggal 14 s.d. 17 April 2008, bertempat di Kota Tegal, menyelenggarakan Rapat Koordinasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap pelestarian dan pemanfaatan peninggalan bawah air untuk mengurangi tindakan ilegal serta meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pelestarian peninggalan bawah air.

2. Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air

Telah dilakukan sertifikasi selam untuk A.1 dan A.2 di Makassar. Telah dilakukan kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengelolaan peninggalan bawah air, yaitu berupa bimbingan teknis fotografi bawah air yang difokuskan pada kemampuan membuat foto mosaik pada tanggal 15-19 Mei 2008, di perairan Tulamben yang terletak di Karangasem, Bali.

3. Kegiatan Konservasi Peninggalan Bawah Air

Direktorat Peninggalan Bawah Air memiliki kurang lebih 40.000 keramik hasil pengangkatan dari situs-situs peninggalan bawah air di wilayah perairan Indonesia. Pada tanggal 22-28 April 2008, telah dilakukan bimbingan teknis konservasi peninggalan bawah air, bertempat di Magelang.

4. Inventarisasi Potensi Peninggalan Bawah Air

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kebaharian yang beragam, terbukti dengan adanya 2 kerajaan besar, Sriwijaya dan Majapahit yang mampu mengelola sumber daya bahari.

5. Kegiatan Penanganan BCB Bawah Air Hasil Pengangkatan

Direktorat Peninggalan Bawah Air memiliki kurang lebih 40.000 keramik hasil pengangkatan dari situs-situs peninggalan bawah air di wilayah perairan Indonesia.

6. Peningkatan Pemahaman Pelestarian Peninggalan Bawah Air (PBA)

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Pelestarian PBA diselenggarakan di Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta pada bulan Mei, di Palembang disinergiskan dengan kegiatan Visit Musi Year pada bulan Juli, dan di Makassar diselenggarakan di Benteng Rotterdam pada bulan Oktober.

7. Penyelamatan Situs Peninggalan Bawah Air

Pada tahun 2008 ini Direktorat Peninggalan Bawah Air, Direktorat Jenderal sejarah dan Purbakala, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, telah melaksanakan kegiatan penyelamatan peninggalan bawah air pada bulan Agustus di Denpasar, Bali dan di Bogor pada bulan Nopember.

8. Penyusunan Masterplan Borobudur

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Kegiatan Evaluasi Masterplan yang telah dilakukan pada tahun 2006-2007. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan sebuah masterplan yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan di Kawasan candi borobudur.

9. Penyempurnaan Naskah Nominasi Warisan Dunia

Bersamaan waktu kegiatan di lapangan, Direktorat Peninggalan Purbakala juga terlibat dalam persiapan dan pendampingan kunjungan Direktur Jenderal UNESCO, Mr. Koichiro Matsuura yang datang ke Bali dalam rangka Pertemuan Menteri-Menteri Pendidikan dari 9 negara di Bali pada tanggal 12 Maret 2008. Dirjen UNESCO berkenan melihat komples Pura Taman Ayun di Badung.

10. Workshop Penyusunan Tentative List

Pelaksanaan kegiatan workshop ini dimulai dengan paparan dari masing-masing situs yang diajukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) yang mengampu, setelah dibuka secara resmi oleh Direktur peninggalan Purbakala. Ada 6 (enam) situs yang diajukan yaitu:

- 1) Tana Toraja Traditional Settlement di Maros Pangkep oleh BP3 Makasar;
- 2) Gua-gua Prasejarah di Maros Pangkep oleh BP3 Makasar;
- 3) Traditional Settlement of Nias oleh BP3 Nanggroe Aceh Darussalam;
- 4) Kompleks Pecandian Muara Jambi oleh BP3 Jambi;
- 5) Kompleks Percandian Muara Takus oleh BP3 Batusangkar;
- 6) Bekas Kota Majapahati di Trowulan oleh BP3 Jawa Timur.

Hasil presentasi dari masing-masing BP3 diulas oleh narasumber yaitu Dr. Karina Arifin (UI), Dr Daud Aris Tanudirjo (UGM), Ir. Arya Abieta (IAI) Dr. Supraktino Rahardjo (UI) dan Ms, Himalchuli Gurung (Unesco Jakarta-Office). Berdasarkan ulasan yang diberikan oleh masing-masing nara sumber dan hasil tanya jawab dengan peserta maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Perlunya kegiatan workshop berikutnya dilakukan langsung di lokasi situs sekaligus sebagai upaya pembekalan langsung terhadap tim yang akan mengerjakan naskah nominasinya.
- 2) Perlunya sosialisasi proses penominasian situs-situs yang diusulkan menjadi warisan dunia
- 3) Perlunya dibentuk pokja di masing-masing BP3 untuk menangani situs-situs yang akan diusulkan menjadi warisan dunia
- 4) Perlunya kesiapan masing-masing situs yang diusulkan baik dalam bidang manajemen/pengelolaan, SDM dan kelembagaan.

11. Pendukungan Nominasi Warisan Dunia Bali di Paris

Kegiatan pendukungan promosi "Bali Landscape: Living in Harmony" yang diselenggarakan di kantor pusat UNESCO di Paris pada 12–16 Mei 2008 untuk memperkenalkan mengenai situs-situs yang diusulkan untuk ditetapkan dalam daftar Warisan Dunia (UNESCO World Heritage List).

12) Finalisasi Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya

Tujuan kegiatan Finalisasi Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya adalah untuk menyelesaikan dan merevisi berbagai draf pedoman yang telah disusun untuk disesuaikan dengan perkembangan dan sistem pemerintahan yang berlaku saat ini (otonomi daerah).

Sasaran kegiatan ini adalah penyelesaian pedoman:

- (1.) Pedoman Pendaftaran Tinggalan Purbakala
- (2.) Pedoman Penetapan Benda Cagar Budaya
- (3.) Ketentuan tentang perijinan pembawaan Benda Cagar Budaya
- (4.) Ketentuan tentang perinjinan pemanfaatan Benda Cagar Budaya



13. Pertemuan Teknis Pelestarian Benda Cagar Budaya

Kegiatan Pertemuan Teknis Pelestarian Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan tahun 2008 telah diselenggarakan oleh Direktorat Peninggalan Purbakala, pada tanggal 5–7 April 2008 di Villa Marina, Anyer, Serang, Banten. Tema kegiatan adalah "Peran Penetapan dalam Rangka Pelestarian Benda Cagar Budaya, Situs dan Kawasan".

14. Penetapan Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs

Kegiatan ini dilaksanakan oleh satu tim terdiri staf Direktorat Peninggalan Purbakala dibantu oleh seorang tenaga dari BP3 Makassar. Kegiatan dilaksanakan selama 6 hari pada tanggal 4-9 Juni 2008. Sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan adalah situs-situs yang terdapat di kecamatan Sanggalangi, Sesean, dan Makale di Kabupaten Tana Toraja.

15. Technical Meeting Rekonstruksi Dan Rehabilitasi Pasca Bencana

Kegiatan dilakukan dalam waktu sekali tiga bulan selama tahun 2008. Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 23 – 26 Maret 2008 di Yogyakarta, dengan melibatkan beberapa orang tenaga ahli.

16. Peresmian Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2008, di kota Pacitan, Jawa Timur. Peresmian Monumen ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk Bidang Museum meliputi:

1. Diskusi Dan Komunikasi Museum Indonesia

Diskusi dan Komunikasi Museum Indonesia ke-3 diselenggarakan di Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan forum komunikasi untuk menyamakan presepsi dalam pengelolaan museum untuk mencapai museum yang mandiri. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 7 - 9 April di Hotel Kini Pontianak.

2. Monografi Museum Indonesia

Dibagi dalam 3 edisi, yaitu edisi Jawa dan Bali, Sumatra, NTT, NTB, dan Kalimantan, Sulawesi, Ambon, Papua, dan dilakukan selama 3 tahun. Penulisan monografi ini dilakukan dengan pendataan melalui pengisian kuesioner, kunjungan langsung ke museum, pengolahan data, penulisan, dan publikasi melalui Website Museum-Indonesia.net.id.

3. Peningkatan Tenaga Teknis Permuseuman Tingkat Menengah

Pelatihan telah dilaksanakan pada tanggal 8-28 Mei 2008 di PPPG Matematika Yogyakarta diikuti oleh beberapa instansi museum di Indonesia berjumlah 30 orang.

4. Seminar "Reposisi Museum Indonesia" Dalam Rangka Pendukungan 100 Tahun Indonesia Bangkit

- 1) Dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2008 di Museum Kebangkitan Nasional, Jalan Abdurahman Saleh No. 26 Jakarta Pusat;
- 2) Dalam "Filosofi Museum" oleh Ir. Yuwono Sri Suwito, MM, Dewan Kebudayaan D.I. Yogyakarta disampaikan tentang sejarah dan makna museum, Visi Museum Indonesia, pengembangan jenis museum berdasar koleksi, berdasar pengelola, dan berdasar wilayah pelayanan;

- 3) Dalam pemaparan makalah dan diskusi dengan tema "Reposisi Museum" oleh Dr. Daud Aris Tanudirdjo, MA., Dosen FIB-UGM Yogyakarta dan dalam pemaparan makalah dan diskusi dengan tema "Reformasi Museum" oleh Ir. Dikdik Kosasih, MA, Museum Geologi Bandung;
- Dalam pemaparan makalah dan diskusi dengan tema "Pandangan dan Harapan Masyarakat terhadap Museum-Museum di Indonesia" disampaikan Pemred Harian Kompas.

5. Sosialisasi Pengelolaan Museum

Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Museum di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 19-20 Juni 2008 di Hotel Utami. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi sosialisasi yaitu:

- 1) Kebijakan Museum (Dra. Intan Mardiana N., M. Hum);
- 2) Aspek Humas Museum (Drs. Kresno Yulianto, M.Hum);
- 3) Aspek Hukum (Yuni Astuti Ibrahim, SH, MM);
- 4) Aspek Teknis Pengelolaan Museum (Drs. Gunawan Ponco Putra dan Drs. Himawan).

6. Monitoring Dan Evaluasi

Sejak berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah, hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki museum, baik besar maupun kecil. Namun, sistem pengelolaan museum secara teknis masih sangat diperlukan di daerah.

- 7. Laporan Pelaksanaan Seminar Sehari "Implementasi Ptk & Sosialisasi Museum Pada Kurikulum 2006 Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan"
- 8. Pameran "Pesona Kain Tradisional Minangkabau"

Pameran diresmikan pada hari Senin, 7 April 2008 pukul 10.00 WIB oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata yang diwakili oleh Direktur Jenderal Sejarah dan Purbakala Drs. Hari Untoro Drajat, MA.



EVALUASI

Kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disusun dalam program kerja Direktorat Jenderal sejarah dan Purbakala selama satu tahun anggaran secara keseluruhan pada umumnya telah berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, meskipun terdapat beberapa hambatan dan kendala tetapi dapat diatasi sehingga tidak mengganggu pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

Secara khusus kendala dan hambatan yang paling dirasakan adalah adanya kebijakan penyesuaian anggaran sebesar 10% dari dana yang belum terserap. Hal ini menyebabkan dilakukan langkah-langkah efisiensi dan peninjauan kembali jadwal kegiatan. Permasalahan-permasalahan lain adalah adanya beberapa kegiatan yang bersifat kontraktual sehingga kegiatan baru selesai menjelang akhir tahun anggaran. Disamping itu juga kurangnya tenaga SDM yang mengelola bidang sejarah dan purbakala baik teknis maupun administrasi.

Dengan melihat permasalahan pokok di atas, maka jalan pemecahan sebagai usaha penanggulangannya adalah:

- 1. Pengembangan sistem informasi dan data base bidang kebudayaan antara lain:
 - 1) Peta Budaya dan
 - 2) Dokumen Arsip Negara;
- 2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola kekayaan budaya pengembangan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan kekayaan budaya;
- 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pembenahan sistem manajerial lembagalembaga yang mengelola kekayaan budaya;
- 4. Review peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan kekayaan budaya.



Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan destinasi pariwisata. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata dibantu oleh 5 orang pejabat Eselon II yaitu : Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur Produk Pariwisata, Direktur Usaha Pariwisata, Direktur Pemberdayaan Masyarakat, serta Direktur Standardisasi Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

 Menyiapkan perumusan kebijakan Departemen di bidang pengembangan destinasi pariwisata.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan standarisasi pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan standardisasi pariwisata.

 Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan standardisasi pariwisata.

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan melalui penerapan kebijakan-kebijakan, diantaranya: pemantapan citra sebagai destinasi yang aman, tertib, nyaman dan ramah lingkungan, mendorong pengembangan destinasi di wilayah NKRI sesuai potensi dan sumber daya masing-masing, meningkatkan product linkage (market lead based product), mengembangkan destinasi berkualitas dan berdaya saing: ekowisata, bahari, budaya, belanja dan mice, merevitalisasi kawasan pariwisata populer, mengembangkan aksesibilitas, jejaring dan keterkaitan (networking and linkage) lintas sektor dan wilayah, meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan kemudahan investasi di destinasi pariwisata. Pada tahun 2008, dalam menstimulasi pengembangan destinasi agar berkemampuan tumbuh lebih unggul dan dapat berkembang lebih cepat, pengembangan destinasi pariwisata menerapkan Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan bagi 10 Provinsi (Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Papua Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur).





Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dalam pelaksanaannya telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Konvensi Nasional Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; menyelenggarakan Konvensi Nasional bidang, Pemandu Selam, Pemandu Museum, Tour Leader, Hotel dan Restoran (Review).

Terwujudnya rumusan unit-unit kompetensi yang merupakan langkah dari keseluruhan rangkaian upaya standardisasi untuk menjadi acuan bagi pengusaha atau industri pariwisata dalam upaya meningkatkan kualitas jasa SDM Pariwisata. Kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai Verifikator yang akan diserahkan kepada Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi untuk ditetapkan Surat Keputusan. Selanjutnya menindaklanjuti Peraturan Menbudpar sebagai pedoman pembinaan, peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia pada:

- 1) Lembaga/Institusi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja;
- 2) Pasar kerja dan dunia usaha serta pengguna tenaga kerja;
- 3) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

2. Diseminasi SKKNI Pariwisata bidang SPA

Dilaksanakan di 6 (enam) lokasi: Surabaya, Batam, Jakarta, Bali, Yogyakarta dan Bandung. Bertujuan mensosialisasikan perkembangan SKKNI dalam menghadapi Liberalisasi (AFAS, AFTA) di sektor pariwisata untuk kesiapan Sumber Daya Manusia yang profesional dalam mengantisipasi masuknya tenaga kerja asing, dan pentingnya program diseminasi SKKNI untuk segera dipercepat dalam rangka proses uji kompetensi terhadap tenaga kerja pariwisata guna memperoleh sertifikat sebagai bukti yang menyatakan seseorang itu kredibel dalamkompetensi tertentu.

3. Workshop Pembuatan Materi Uji Kompetensi Bidang Pariwisata

Materi Uji Kompetensi (MUK) merupakan bagian terpenting dalam proses Sertifikasi. MUK yang telah ada saat ini baru 2 bidang di hotel, yaitu bidang *House Keeping* dan *Food & Beverage Service*. Tahun 2008 kegiatan pendukungan daya tarik pariwisata daerah memfasilitasi 4Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata yang ada, yaitu; LSP Pariwisata—Jakarta, LSP Pariwisata Nusantara—Bandung, LSP Pariwisata Indonesia—Bali, dan LSP Cohespa-Surabaya dalam penyusunan MUK bidang hotel, yaitu bidang Front Office, bidang Food Production, dan Tingkat Manajerial, serta MUK bidang SPA.

4. Kerjasama Standar Pariwisata

Di regional ASEAN sudah dilaksanakan kerjasama dalam menyusun standar kompetensi untuk tenaga professional pariwisata di kawasan ASEAN, yang dikenal dengan *ASEAN Common Competency Standard for Tourism Profesionals* (ACCSTP). Setelah penyusunan ACCSTP, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Mutual Recognition Arrangement sebagai patokan untuk melaksanakan ACCSTP di tingkat operasional. Di bidang pengembangan standar produk pariwisata, telah tersusun 6 standar di bidang *green hotel, tourism heritage, ecotourism, homestay, local food and beverage*, dan *public toilet.* Pada pertemuan ATF 2008 telah dirilis pemberian ASEAN Award kepada hotel yang dinilai menerapkan green hotel standard, dan telah 10 hotel Indonesia mendapatkannya.

5. Workshop Peningkatan Sumber Daya Manusia

Dilaksanakan bekerjasama dengan BKPM, dalam rangka penguatan pengembangan investasi di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta, masing-masing diikuti oleh 40 orang peserta, sebagai upaya menyiapkan SDM untuk menggalakkan investasi.

6. Fam Trip Penguatan Daya Tarik Wisata bagi BPW Jakarta ke Jateng dan Yogyakarta

Meningkatan kapasitas/kemajuan teknis penyusunan paket wisata bagi para pengelola BPW se-Jawa Tengah di Salatiga yang diikuti oleh 38 orang peserta dan peningkatan kapasitas SDM bagi para pengelola restoran dan rumah makan di Yogyakarta yang diikuti oleh 50 orang peserta untuk



Ditandatanganinya MOU dengan PT. Angkasa Pura I dan II dalam rangka memberikan penyuluhan peningkatan mutu pelayanan frontliner dan mitra kerja di Bandara Soekarno Hatta yang diikuti oleh 200 orang peserta dan Bandara Ngurah Rai Bali yang diikuti oleh 150 peserta dari para stakeholders.

8. Pengembangan Fasilitas VoA di Entikong dan Bandara Sepadio, Kalimantan Barat

Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata ke Indonesia telah dibuka fasilitas VOA di Entikong dan Bandara Sepadio, Kalimantan Barat agar wisatawan mancanegara dari Sabah dan Serawak lebih mudah dalam hal pengurusan berkas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisman yang datang dan berkaitan dengan hal tersebut telah diadakan kegiatan Rakornis dan bimbingan teknis kepada usaha pariwisata di Kalimantan Barat yang masing-masing diikuti oleh 75 orang peserta.

9. Konferensi Ecotourism Negara-negara Asia dan Amerika Latin (FEALAC)

Dalam upaya pengembangan Ecotourism telah dilaksanakan Konferensi negara-negara Asia dan Amerika Latin (FEALAC) pada bulan Juli di Bali bekerja sama dengan Deplu yang dihadiri oleh sekitar 200 orang peserta dari dalam negeri maupun luar negeri.

10. Sosialisasi Sadar Wisata

Sosialisasi Sadar Wisata tahun 2008 kemudian dilaksanakan ke provinsi-provinsi di Indonesia, antara lain: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua Barat.

11. Program pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan

Dilakukan sebagai komitmen pariwisata pro poor, dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan memperluas wawasan masyarakat agar mampu memperbaiki kesejahteraan hidupnya. Beberapa program dilakukan antara lain: program pelatihan kerajinan rakyat di daerah Loksado, Kalimantan Selatan, Kerajinan tenun di desa Silungkang Sumatera Barat, Desa Sukarare Nusa Tenggara Barat.

12. Penyusunan Pedoman Penanggulangan Kemiskinan melalui Desa Wisata

Tahun 2008 dalam rangka implementasi Tahun Pencanangan Pemberdayaan Masyarakat yang telah dicanangkan oleh Presiden RI dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu dipersiapkan pedoman pelaksanaan untuk panduan dalam mengimplementasikan program—program pemberdayaan masyarakat khususnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri bidang Pariwisata.

13. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan adalah mencakup dua kegiatan yaitu menyiapkan pedoman kemitraan pemberdayaan masyarakat guna mensinkronisasikan pola-pola kemitraan dalam pengembangan suatu Destinasi serta menyiapkan pedoman kawasan pariwisata sehat bagi para pengelola kawasan pariwisata. Sedangkan sasarannya adalah memperlancar dan mempermudah dalam pengembangan kepariwisataan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang pariwisata.

14) Harmonisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat

Mewujudkan harmonisasi dan sinergitas berbagai program pemberdayaan masyarakat oleh Depbudpar dan instansi lainnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya daerah miskin yang berada di sekitar daerah tujuan wisata.

15. Kampanye Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak (PESKA) di lingkungan Pariwisata

Ditujukan untuk menanggulangi kejahatan ESKA di destinasi pariwisata. Program dilaksanakan dalam berbagai bentuk antara lain: koordinasi antar departemen, asosiasi pariwisata dengan maksud meningkatkan kepedulian dan kesadaran para pemangku kepentingan dalam upaya menjaga citra pariwisata Indonesia dan melindungi anak-anak dari bahaya ESKA.

16. Penetapan Objek Vital Nasional (Obvitnas)

Untuk pengamanan aset objek vital nasional di bidang kebudayaan dan pariwisata maka, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.34/HM.001/MKP/2008 tanggal 8 September 2008 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Pada Permen Budpar tersebut telah ditetapkan 29 Obvitnas di bidang kebudayaan dan pariwisata.

17. Deep Indonesia 2008

Merupakan satu-satunya ajang pameran diving Internasional di Indonesia bertajuk diving, adventure dan water sport, diikuti oleh para peserta dari dalam dan luar negeri.

18. Sosialisasi World Ocean Conference (WOC)

Dalam upaya mempersiapkan Sulawesi Utara sebagai tuan rumah WOC, konferensi sedunia untuk membahas masalah-masalah kelautan dan maritim yang akan dilaksanakan di Manado pada tanggal 11-15 Mei 2009 dan dihadiri oleh delegasi dari negara-negara di seluruh dunia yang terdiri atas Kepala Negara atau Kepala Kepemerintahan, Menteri, Ilmuwan dan perwakilan dari NGO. Selain menjadi agenda resmi kenegaraan, WOC juga didukung oleh *United Nation Environment Programme* (UNEP) dan *Global Forum*, dengan kegiatan:

1) Sosialisasi kepada Dinas Pariwisata 13 Kabupaten dan Pelaku pariwisata se Sulawesi Utara;

- 2) Temu Wicara pelaku pariwisata se Sulawesi Utara;
- 3) Temu Wicara pengelola Diving Center dan Diving Resor se Sulawesi Utara;
- 4) Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pramuwisata se Sulawesi Utara.

19. Workshop Pengembangan Daya Tarik Wisata

Tujuan memberikan penjelasan tentang konsep dan cara penilaian daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan kualitas daya tarik wisata menuju keberhasilan pariwisata Indonesia.

20. Sosialisasi Pengolahan Limbah Padat pada Hotel dalam rangka Kegiatan Implementasi Green Tourism di bidang Usaha Perhotelan

Diadakan di Bali dengan tema "Hotel Berwawasan Ramah Lingkuangan dalam Perubahan Iklim" masalah yang diangkat dalam sosialisasi ini adalah implementasi mesin ramah lingkungan Environment Recycling System yang telah ditempatkan di Lippo Cikarang dan Nusa Dua Bali.

21. Peningkatan Kualitas Produk Cinderamata Kriya Etnik (CKE)

Sejalan dengan digencarkannya era industri kreatif atau ekonomi kreatif, selama dua tahun terakhir ini telah dilaksanakan program-program terkait yang dapat dijadikan sebagai ikon destinasi wisata sekaligus upaya melestarikan tradisi kriya yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, contoh produk CKE yang dapat dijadikan ikon destinasi tersebut adalah bentuk sasando atau komodo (NTT), rumah gadang (Sumatera Barat), bentuk binatang langka, seperti Tarsius atau ikan purba (Sulut), dan bentuk kapal Phinisi (Sulawesi Selatan).

22. Sosialisasi "The Tsunami Ready" Toolbox for The Indonesia Hotel Industry

Upaya penataan kembali kawasan wisata-wisata populer yang terkena bencana tsunami, antara lain dilakukan dukungan penataan terhadap Kawasan Pangandaran.

23. Koordinasi Pembangunan Destinasi Pariwisata

Telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan :_Rapat Koordinasi di 5 Wilayah yang mewakili 5 Cluster (Sumatera, Jawa-Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku-Papua), Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi (Papua Barat, Babel, Surabaya, Palangkaraya dan Palu); Penyusunan Rancangan Struktur Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; Penyusunan Perencanaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata; Penyusunan Kebijakan Destinasi Pariwisata; Dukungan Pengembangan Kawasan Pariwisata; Dukungan Event Nasional dan Internasional; Penyusunan Pedoman, Masterplan, Prastudy Kelayakan, dan Penyusunan Database Pariwisata.

24. Studi Pengembangan Green Tourism di Indonesia

Merupakan bentuk operasionalisasi dari konsepsi *Green Productivity* pada bidang pariwisata. *Green Productivity* adalah suatu strategi simultan dan sistematis untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan dalam rangka pembangunan sosial ekonomi.

25. Dukungan Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Morotai-Maluku Utara

Dimaksudkan untuk menyusun suatu Rencana Aksi Pengembangan Wisata Bahari, dengan tujuan: mengidentifikasi isu strategis dalam pemanfaatan potensi kelautan untuk pengembangan produk wisata bahari yang meliputi atraksi, amenitas dan akses, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pasar yang menyangkut pemasaran dan promosi,, institusi dan kelembagaan.

26. Dukungan Pengembangan Wisata Way-Kambas

Dilakukan melalui penyusunan *Master Plan*, Pendukungan Fasilitas Wisata khususnya tempat pertunjukan Gajah yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas atraksi wisata dan keseimbangan ekologis dalam pengembangan Pusat Konservasi Gajah di Provinsi Lampung.

27. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Banda Aceh

Tersusunnya suatu Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Banda Aceh yang komprehensif dan berkelanjutan serta terintegrasi dengan memperhatikan aspek lingkungan alam dan budaya.

28. Penyusunan Master Plan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu

Adalah arahan dan strategi pengembangan pariwisata secara terpadu yang mempu mendorong pengembangan wilayah potensial dan memacu pertumbuhan serta peningkatan kesejahteraan.

29. Penyusunan Pra Studi Kelayakan Pengembangan Kegiatan Pariwisata

Bertujuan untuk mendorong pengembangan potensi kepariwisataan nasional sehingga destinasi wisata dapat tumbuh dan berkembang serta mempunyai daya tarik yang tinggi dan berkualitas.

30. Penyusunan Master Plan Panti Rebo, Bangka Belitung

Penyusunan bersifat komprehensif dan berkelanjutan, berpedoman kepada master plan akan tercipta kesamaan persepsi dan cara pandang pihak-pihak terkait sehingga tercipta kondisi sinergis dalam program kegiatan mendukung pengembangan pariwisata di Kawasan Pantai Rebo.

31. Pengembangan Desa Wisata Kawasan Wisata Dieng Jawa Tengah

Dilaksanakan untuk tersusunnya rencana detail, meningkatkan ragam daya tarik pariwisata, meningkatkan investasi dan pemasaran, memberikan analisis dan arah awal serta terwujudnya sentra budaya, agro, peternakan dan industri rumah tangga.

32. Penyusunan Studi Kalayakan Rest Area Sosok, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat

Menangkap peluang pengembangan *stop over* di Sosok, mengingat selama ini jalur perjalanan wisata overland dari Kota Pontianak sebagai kota Orde I ke Entikong sebagai kota perbatasan dengan negara Malaysia belum optimal, serta mengembangkan diversifikasi produk wisata untuk meningkatkan keragaman obyek dan daya tarik wisata.

33. Dukungan Pengembangan Wisata Bahari Gorontalo

Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat di bidang wisata bahari, meningkatkan keterampilan dan profesionalisme masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat guna terwujudnya peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

EVALUASI

Berbagai program kerja Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata diarahkan untuk peningkatan kualitas destinasi pariwisata nasional. Namun demikian disadari bahwa proses yang telah berjalah belum signifikan meningkatkan kapasitas dan kualitas pengembangan destinasi pariwisata. Hal ini disebabkan ruang lingkup program, kompleksitas dan membutuhkan sinergi dengan stakeholder. Sasaran pencapaian program diharapkan secara bertahap dapat mewujudkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, peningkatan pembangunan pariwisata di daerah dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan. Khususnya dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan pariwisata nasional.

Bobot untuk pengembangan destinasi pariwisata unggulan (Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Papua Barat, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur), Pengembangan Standardisasi, Pemberdayaan Masyarakat di destinasi pariwisata, Pengembangan Usaha dan Investasi Pariwisata, Pendukungan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Daerah, dan Optimalisasi Koordinasi Pembangunan Pariwisata.



Direktorat Jenderal Pemasaran

Direktorat Jenderal Pemasaran dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemasaran. Dalam melaksanakana tugas Direktur Jenderal Pemasaran dibantu oleh 6 orang pejabat Eselon II yaitu: Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur Pengembangan Pasar, Direktur Promosi Luar Negeri, Direktur Promosi Dalam Negeri, Direktur Sarana Promosi dan Direktur Konvensi, Insentif dan Pameran/Meeting, Incentive, Convention & Exhibition (MICE).

Direktorat Jenderal Pemasaran mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pemasaran.

 Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri, dan sarana promosi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Penyusunan standar, norma, kriteria, dan prosedur di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri, dan sarana promosi.

4. Pemberian bimbingan teknis & evaluasi di bidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri, dan sarana promosi.

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.



Upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan perolehan devisa negara dan peningkatan pendapatan daerah serta masyarakat secara langsung melalui pengembangan sektor pariwisata terus dilakukan. Kontribusi yang diberikan Direktorat Jenderal Pemasaran adalah mempercepat proses pemulihan dan peningkatan citra kepariwisataan nasional agar Indonesia kembali menjadi destinasi unggulan dengan citra aman, nyaman dan menarik untuk dikunjungi melalui berbagai upaya pemasaran. Program Direktorat Jenderal Pemasaran bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar pariwisata Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri melalui berbagai strategi pemasaran dan promosi yang terpadu untuk memantapkan citra pariwisata Indonesia di dunia Internasional melalui pengembangan kebijakan pemasaran peningkatan promosi pasar, dan peningkatan sarana promosi.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 oleh Direktorat Jenderal Pemasaran sebagai berikut:

1. Keikutsertaan Pada Event-event Pemasaran Pariwisata di Luar Negeri

- Reiseliv International Travel Fair, di selenggarakan di Norges Varemesse Lillestrom, Norwegia pada tanggal 10-13 Januari 2008;
- 2) Fitur Madrid dilaksanakan pada tanggal 23-28 Januari 2008 bertempat di Madrid, Spanyol;
- ASEAN Tourism Forum (ATF) 2008, Bangkok-Thailand, berlangsung pada tanggal 25-28
 Januari 2008;
- 4) Internationale Tourismus Borse (ITB) dilaksanakan di Berlin, Republik Federasi Jerman pada tanggal 5-9 Maret 2008;

- 5) Seatrade Cruise Shipping Convention, berlangsung pada tanggal 10-14 Maret 2008 di Miami;
- 6) MATTA Fair, dilaksanakan pada tanggal 14-16 Maret 2008 di Kuala Lumpur di Malaysia;
- 7) Guangzhou International Travel, dilaksanakan pada tanggal 4-6 April 2008 di Guangzhou Jinhan Exhibition Centre RRT;
- 8) Indonesia Tourism and Travel Fair (ITTF), digelar pertama kalinya pada tanggal 11-14 September 2008 di JCC;
- 9) Pasar Malam Besar Tong-Tong Festival 2008 pada 21 Mei-Juni 2008 di Den Haag Belanda:
- 10) Sumatera International Travel Fair (SITF) VI, berlangsung pada tanggal 30 Mei 1 Juli 2008;
- 11) Sales Mission Afrika Selatan dilaksanakan pada 17-19 Juni 2008 di tiga kota yaitu Johannesburg, Durban dan Cape Town;
- 12) Sales Mission Australia-New Zealand berlangsung pada tanggal 29 Juni 9 Juli 2008;
- 13) Korea Word Travel Fair (KOTFA), COEX, SEOUL, berlangsung pada tanggal 5-8 Juli 2008 dan merupakan kegiatan yang ke-21;

14) Dukungan Upacara Pelebon (Ngaben keluarga kerajaan Puri Ubud) dilaksanakan pada tanggal 9-17 Juli 2008 di Ubud-Bali;



- 15) Natas Holidays Travel Fair (National Association Of Agents Of Singapore) 2008, dilaksanakan pada tanggal 1-3 Agustus 2008;
- 16) OCEAN Park di Hongkong pada tanggal 16-18 Agustus 2008 di Hongkong;
- 17) Sabah-Indonesia Culture Night "Kota Kinibalu" pada tanggal 28 Agustus 2008 di Malaysia;
- 18) Festival Indonesia 2008 di Melbourne-Australia pada tanggal 29-31 Agustus 2008, diikuti oleh: Bali, NTB, Kaltim dan Sulut;
- 19) Festival Indonesia 2008 pada tanggal 29-31 Agustus 2008 di Melbourne, Australia;
- 20) Co-Marketing dengan Lima Tour Operator Korsel pada tanggal 3 September 2008 di Seoul;
- 21) MATTA Fair XXVI, berlangsung dari tanggal 3-7 September 2008;
- 22) BUSAN International Travel Fair berlangsung dari tanggal 5-8 September 2008 di BUSAN Korea Selatan yang diikuti 20 Negara;
- 23) Sales Mission pada tanggal 8-14 September 2008 di Mumbai, Delhi Chenai, India;
- 24) PTM di Hyderabad, India pada tanggal 16-19 September 2008 di International Convention Center Hyderabad India;
- 25) Consumer Selling dilaksanakan di Sunway Pyramid Shopping Mall Selangor Malaysia pada 11-12 Oktober 2008;
- 26) Sea Trade All Asia Convention pada tanggal 23-25 Oktober 2008 di Port International Cruise Terminal (SPICT) di Shanghai China;

- 27) Tactical Promotion Singapore pada tanggal 30 Oktober-1 Nopember 2008 di Singapura;
- 28) Sales Mission ke Kota Taichung dan Kaohsiung pada tanggal 4-6 Nopember 2008
- 29) CITM (China International Travel Mart) pada tanggal 20-23 Nopember 2008 di China;
- 30) Sales Mission di 3 kota pada tanggal 17-21 Nopember 2008 di Guangzhou, China;
- 31) Consumer Selling di Singapura dan Malaysia pada 18 Nopember 2008 di Selangor, Malaysia;
- 32) Direct Selling di Mall pada tanggal 21-23 Nopember 2008 di Korea;
- 33) Dukungan Sales Contest Korea Air pada tanggal 20-24 Nopember 2008 di Korea;
- 34) Sales Mission Dubai dan Kuwait pada tanggal 23-26 Nopember 2008 di Dubai, Kuwait;
- 35) Tactical promotion di Afrika Selatan pada tanggal 1-4 Desember 2008 di Afrika Selatan;
- 36) Dukungan promosi pariwisata KBRI Tokyo pada tanggal 2-7 Desember 2008 di Tokyo, Jepang;
- 37) Co Marketing Jerman dan Belanda pada tanggal 2-7 Desember 2008 di Jerman-Belanda;
- 38) Seatrade Venesia, Italia pada tanggal 9-11 Desember 2008 di Venesia Italia.\\

2. Promosi melalui Familiarization Trip (Fam Trip) 2008

Dari kunjungan Fam Trip diharapkan Tour Operator/Jurnalis, Pembuat Film, Artis, Wholeseler, Retailer dan Airlines yang telah kita undang sebagai peserta, dapat melihat secara langsung keadaan destinasi dan hal-hal yang dapat disaksikan sendiri di Indonesia dalam konteks keamanan, keindahan alam dan keaneka ragaman budaya Indonesia dan membuktikan bahwa "Selling Is Believing"



- 3) Upaya pencapaian target 7 juta wisman, berbagai upaya dan terobosan dilakukan, antara lain dengan penyediaan bahan promosiliyang disesuaikan dengan selera pasar baik design maupun materi antara lain:
 - 1) Penyediaan bahan promosi cetak yang disesuaikan dengan selera pasar baik design maupun materi dalam bahasa asing dan tema;
 - 2) Pembuatan Film Promosi Pariwisata Indonesia Visit Indonesia Year 2008;
 - 3) On Line Promo di Media Nasional;
 - 4) Pengembangan Website Visit Indonesia Year 2008;
 - 5) Pemutakhiran Informasi Multimedia;
 - 6) Pengembangan Elektronik Marketing;
 - 7) Penggandaan CD dan DVD Pariwisata Indonesia;
 - 8) Pembuatan Electronic Brochure;
 - 9) Promosi melalui Media Lokal cetak, Elektronik dan Media luar ruang;
 - 10) Pemasangan Iklan cetak Dalam Negeri dan Luar Negeri;
 - 11) Promosi melalui iklan Media Elektronik di Dalam dan Luar Negeri;
 - 12) Sosialisasi Branding Pariwisata Indonesia;
 - 13) Pelayanan Data dan Informasi Pariwisata Indonesia;
 - 14) Pendistribusian Bahan Promosi Pariwisata;
 - 15) Pembuatan System Information Management (SIM) Distribusi;

4. Promosi Dalam Negeri

Kegiatan utama berupa dukungan event daerah dan penyelenggaraan event dalam negeri yang dimaksudkan menarik perhatian masyarakat Indonesia tentang pariwisata nusantara, meningkatkan minat masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata di dalam negeri, meningkatkan informasi wisata nusantara, mendorong atau merangsang pihak swasta untuk menyelenggarakan event, seperti:

- 1) Kegiatan Dzikir di Masjid Raya Batam pada 28 Juni 2008 yang dihadiri + 250 wisatawan lokal;
- 2) Festival Vegetarian dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2008 di Batam;
- 3) Kemilau Sulawesi dilaksanakan di Gorontalo pada tanggal 24-27 Juli 2008;
- 4) Kemilau Sumatera dilaksanakan pada tanggal 17-20 Juli 2008 di Palembang;
- 5) Penayangan Ayat-ayat Cinta dilaksanakan di Batam pada tanggal 12 Juli 2008;
- 6) Festival Budaya Papua/Baliem Wamena dilaksanakan pada 8-11 Agustus 2008 di Jayapura;
- 7) Konser Musik di perbatasan Entikong prop. Kalbar pada tanggal 1 Nopember 2008);
- 8) Festival Borneo Extravaganza dilaksanakan di Bali pada tanggal 21-24 Nopember 2008;
- 9) Festival Singkawang dilaksanakan di Singkawang pada tanggal 14-16 Nopember 2008;
- 10) Fashion Show dilaksanakan di Batam pada tanggal 5 Oktober 2008;
- 11) Festival Kuliner dilaksanakan di Batam pada tanggal 15 Nopember 2008;
- 12) Festival Busana Nusantara dilaksanakan di Palembang pada tanggal 22-23 Nopember 2008;
- 13) Festival Batik Nusantara dilaksanakan di Solo pada tanggal 21-23 Nopember 2008;
- 14) Kuiz Pariwisata dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 11-26 Nopember 2008'
- 15) Deepavali dilaksanakan di Batam pada tanggal 29-30 Nopember 2008;
- 16) Festival Jepen dilaksanakan di Tarakan Kaltim pada tanggal 29-30 Nopember 2008.

festival 2000

5. Kegiatan Meeting, Incentive, Convention & Exhibition (MICE) yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2008 terdiri atas event internasional sebanyak 209 event dan event nasional sebanyak 488 event.

Dukungan kegiatan MICE yang telah dilaksanakan, antara lain:

- 1) Pertemuan Internasional ke-2 Centrist Democrat International (CDI) Asia Pasifik pada tanggal 5 Januari di Jakarta;
- Persiapan World Federation of Tourism Guide Association (WRTGA) 2009 pada bulan Januari 2008 di Bali;
- 3) Golf Indonesia Open pada tangal 14-17 Pebruari 2008 di Tangerang;
- 4) Grand Racing pada tanggal 16-17 Pebruari 2008 di Sirkuit Sentul, Bogor;
- 5) Festival Food Hotel & Tourism 2008 pada tanggal 28 Pebruari-3 Maret 2008 di Bali;
- 6) International Councils of Woman II pada tanggal 29 Pebruari & 3 April 2008 di Bogor, Jakarta;
- 7) Dukungan Java Jazz Festival 2008 di laksanakan di Jakarta Convention Centre, pada tanggal 7-9 Maret 2008;
- 8) Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) pada tanggal 15-16 Maret 2008 di Kintamani, Bali;
- 9) Kiwanis 33rd Asia Pacific Convention pada tanggal 28 Maret 2008 di Hotel Sultan, Jakarta;
- Children International Summer Village (CISV) pada tanggal 27 Maret April 2008 di Gunung Geulis, Bogor;
- 11) Incentive Tour Korea pada April, Mei dan Juli 2008 di Bali;
- 12) Adi Wastra Nusantara pada tanggal 16-20 April 2008 di JCC, Jakarta;

- 13) Asia Dive Expo (ADEX) 2008 pada tanggal 17-22 April 2008;
- 14) Dukungan pada Kirab Obor Olimpiade Beijing pada tanggal 22 April 2008 di Glora Bung Karno Senayan, Jakarta;
- Dukungan Government Leader Forum-Asia (GLF) di Hotel Shangri-La pada 8 Mei 2008 dan JCC pada 7 Mei 2008 yang dihadiri oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono serta Wapres, Yusuf Kalla;
- 16) The 3rd Global Intermedia Dialogue (GIMD) pada tanggal 7-8 Mei 2008 di Bali;
- 17) Pacific Regional Seminar on Decolonization pada tanggal 14-16 Mei 2008 di Bandung;
- 18) 1st Congress of South East Asia Tourist Guide Association (SEATGA) pada tanggal 30 Mei-2 Juni 2008 di Padang Sumbar;
- 19) Dukungan event 2008 The 3rd Conference on Asean-China People-to-People Friendship Organization (Cacfo) dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 2 4 Juni 2008;
- 20) Dukungan Delegasi Pemerintah & Pengusaha Propinsi Guangdong-China pada 2-4 Juni 2008 di hotel Shangri-La, Jakarta;
- 21) Dukungan penyelenggaraan Pekan Produk Budaya Indonesia di JHCC pada tanggal 4-8 Juni 2008 di JHCC Jakarta.
- 22) Aseanta pada tanggal 6 Juni 2008 di Bali;
- 23) Chief de Mission Asian Beach Games (ABG) pada tanggal 6-8 Juni 2008 di Bali;
- 24) 3rd Orthodontic Conference & Exhibition pada tanggal 18-21 Juni 2008 di Bali;
- 25) Offroad International pada tanggal 19 Juni 2008 di Jakarta;
- 26) The 4th Wfdrs Asia Pacific Deaf Youthcamp pada tanggal 22-27 Juni 2008 di Jakarta;

- 27) 11th Aspac Group on Money Laundering pada tanggal 7-11 Juli 2008 di Bali;
- 28) Temu Pengusaha RI-RRC pada tanggal 17-24 Juli 2008 di Jakarta;
- 29) 10th Anniversary of The Annual International Meeting of Respiratory Care Indonesia (RESPINA) pada tanggal 6-9 Agustus di Bali;
- 30) Sanur Village Festival pada tanggal 21-26 Agustus 2008 di Kalsel;
- 31) Seminar Antropologi International, pada tanggal 25-29 Agustus 2008 di Bali
- 32) Sidang Asean Telsom ke-9 Asean Telkim ke-8, pada tanggal 26-27 Agustus 2008 di Jakarta
- 33) Reuni Masyarakat China ke Indonesia (PP 10), pada tanggal 30 Agustus 1 September 2008 di Bali
- 34) Pertemuan Marga Xu Sedunia, pada tanggal 2 September 2008 di Jakarta
- 35) Indonesia Tourism & Travel Fair / ITTF 2008, pada tanggal 11-14 September 2008 di Jakarta
- 36) 3rd Afeca AGM & Forum 2008, pada tanggal -14 September 2008 di Jakarta
- 37) Lomba Layar Internasional (PORLASI) pada tanggal 7-13 Oktober 2008 di Bali
- 38) Garuda Indonesia Year Golf Tournament (GAGT), pada tanggal 16-17 Oktober 2008 di Makassar
- 39) The 1st Asian Fitness and Health Conference & Expo 2008, pada tanggal 18 Oktober 2008 di Jakarta
- 40) Asian Beach Games, pada tanggal 18-26 Oktober 2008 di Bali
- 41) Welcoming Party Asosiasi Pengusaha China, pada tanggal 19 Oktober 2008 di Jakarta
- 42) Insentive Tour Kyobo In durance Korea, pada tanggal 20-26 Oktober 2008 di Bali

- 43) 22nd Asian Stamp Exhibition, pada tanggal 23-28 Oktober 2008 di Jakarta
- 44) Asia Broadcasting Union General Assembly, pada tanggal 24 Oktober 2008 di Bali
- 45) International Ecotourism Business Forum & Mart 2008, pada tanggal 25-30 Oktober 2008 di celebrating 100 years of national awakening
- 46) Forum Bisnis Indonesia India, pada tanggal 27 Oktober 2008 di Bali
- 47) Indonesia Dance Festival, pada tanggal 27-31 Oktober 2008 di Jakarta
- 48) Business Tour Dubes Anggota OKT/Timteng, pada tanggal 31 Oktober 2 Nopember 2008 di Bali
- 49) International Humanitarian Conference on Assistantship for Victims of Occupation (Palestina) pada 1 Nopember 2008 di Jakarta
- 50) Peringatan 50 Tahun Indonesia Jepang, pada tanggal 1-9 Nopember 2008 di Jakarta
- 51) Post Tour local, pada tanggal 10 Nopember 2008 di Yogyakarta
- 52) AWARD, pada tanggal 11-15 Nopember 2008 di Jakarta
- 53) Evolution of Batik pada tanggal 21-23 Nopember 2008 di Jakarta
- 54) Jakarta Jazz 2008 pada tanggal 23-27 Nopember 2008 di Jakarta
- 55) Prayanama Dhyan Shibir 2008 Health & Happiness bersama Guru Ji, pada tanggal 25-29 Nopember 2008 di Bali
- 56) International Food Expo, pada tanggal 1-3 Desember 2008 di Bandung
- 57) 1st IMCTM (Indonesia MICE & Corporate Travel Mart) pada 3-6 Desember 2008 di Bali
- 58) Asia Pacific Education and Training Institute In Tourism (APETIT) pada tanggal 10-12

 Desember 2008 di Bali

6. Kegiatan pendukungan terhadap 10 Provinsi Unggulan, yaitu:

- 1) Propinsi Sumbar: Fam Trip penulis Pariwisata Nasional dan Internasional; Silaturahmi Masyarakat Minang, Singapura & Malaysia di Batam; Sales Mission China: MATTA: Festival Indonesia Ocean Park-Hongkong; Sales Mission Jedah; Pengadaan Sarana Promosi.
- 2) Propinsi Sulut: Meeting Ecotourism BIMP-EAGA; Festival Bunaken 2008; Festival kegiatan Nyong dan Noni Sulut; Sulut Expo 2008; MATTA Travel Fair 2008; JATA 2008; Dema Show-Las Vegas; Shanghai Parade of Float; Pengadaan Sarana Promosi Pariwisata.
- 3) Propinsi Sumut: *International Tourism & Travel Fair; Fam Trip* Wartawan; TIME; Festival Keraton Nusantara; ITB Asia; MATTA *Travel Fair*; PATA Travel Mart, India; Pengadaan Sarana Promosi.
- 4) Propinsi NTB: ITTF; Senggigi Festival; Bulan Apresiasi Budaya; Lombok International Triathlon; Lebaran & Perang Topat; Fam Trip Travel Writer; MATTA Travel Fair; Festival Indonesia di Melbourne; JATA World Travel Fair di Jepang; PTM India; ITB Asia; Pengadaan Sarana Promosi.
- 5) Propinsi Kepulauan Riau: Dragon Boat Race; Rakernas HPI; Kenduri Seni Melayu; *Tournament Golf Gubernur Cup*; ITTF 2008; WTM London; Pengadaan sarana promosi Pariwisata.
- 6) Propinsi Kaltim: Borneo Extravaganza; TIME di Makassar; Kemilau Seni Budaya Benua Etam; Dema Show; Festival Indonesia; MATTA *Travel Fair*; Pengadaan sarana promosi pariwisata.
- 7) Propinsi Papua Barat: ITTF 2008; Fam Trip Wartawan ke Papua Barat; Dema Show; Pengadaan sarana promosi pariwisata.
- 8) Propinsi Sumsel: Festival Raw Tengkayu Kaltim; ITTF; Festival Keraton Nusantara; WTM London; TITF Taipei; CITM China; Pengadaan sarana promosi pariwisata, Pemasangan iklan di media cetak penayangan potensi pariwisata Sumsel di TVRI Nasional.
- Propinsi Sulsel: ITB Asia; CITM, China; Press Conference Lovely December; TIME; MATTA Travel Fair; Pengadaan sarana promosi.
- 10) Propinsi NTT: ITTF; TIME, ENTEX; Pengadaan sarana promosi pariwisata.



- visit
- 7. Visit Indonesia Year 2008 dilaksanakan guna menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Agar hal tersebut dapat tercapai maka perlu adanya kerjasama promosi dengan pihak swasta. Beberapa kerjasama dengan pihak swasta antara lain:
 - 1) Kerjasama Promosi antara AMEX Danamond dengan Depbudpar, pada Januari Agustus 2008 di Jakarta;
 - Penandatanganan MOU antara Depbudpar-RI dengan PT. BANK ICBC Indonesia pada tanggal 1
 April 2008 di Jakarta;
 - 3) Komunitas Melayu dari Singapura ke Sumbar, pada tanggal 7-10 Juni di Padang, Sumbar;
 - 4) Pekan Budaya Sumatera Barat pada tanggal 6-12 Juli 2008 di Padang, Sumbar
 - 5) Kerjasama promosi antara Depbudpar dengan Air Asia dalam rangka mendukung VIY 2008 pada 24 Juli 2008 di Jakarta;
 - 6) PR-Ing Media Cetak dan Elektronik Festival Singkarak Danau Kembar, pada tanggal 3-5 Agustus 2008 di Jakarta;
 - 7) Sanur Village, pada tanggal 10 Agustus 2008 di Denpasar;
 - 8) Opera Jawa Garin Nugroho, pada tanggal 18-22 Agustus 2008 di Zurich, Swiss;.



EVALUASI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dalam tahun 2008 pemerintah beserta seluruh mitras pembangunan kepariwisataan telah melakukan upaya-upaya yaitu antara lain ing awaken ing

- Operasionalisasi dari 9 Branded Offices, yang disebut dengan Visit Indonesia Tourism Offices (VITO) di pasar utama, yaitu Australia, Jepang, China, Korea, Malaysia, Singapura, India, Uni Emirat Arab, serta Jerman;
- Melakukan Co-Marketing dengan perusahaan penerbangan, bank, penerbit kartu kredit, serta dengan Asosiasi kepariwisataan;
- Berperan serta aktif dalam kegiatan promosi di berbagai bursa pariwisata berskala internasional di seluruh focus pasar, tanpa melupakan bursa pariwisata internasional yang diselenggarakan di Indonesia;
- Cross-Border Promotion juga dilakukan di berbagai daerah yang berbatasan dengan pasar utama kita, seperti Batam, Bintan, Entikong dan Atambua dalam bentuk gelar seni dan budaya, pertemuan adat serta pertunjukan musik kontemporer;
- Menyelenggarakan serta mendukung pelaksanaan dari event dan festival seni, budaya dan pariwisata serta berbagai kegiatan MICE di seluruh Indonesia;

Secara keseluruhan, walaupun target 7 juta tidak tercapai, *performance* kunjungan wisman tahun 2008 mampu membukukan pertumbuhan 2 digit dan diatas 10% melebihi pertumbuhan negara-negara pesaing terdekat, walaupun dihadapkan pada kondisi yang kurang menguntungkan seperti : kenaikan BBM, isu terorisme dan krisis kuangan global.

Selain itu, selama tahun 2008 telah terjadi beberapa pemecahan rekor perolehan, baik jumlah kunjungan maupun penerimaan devisa. Hal ini menunjukkan penerapan pendekatan dan strategi pemasaran "new wave marketing" ternyata efektif mendorong pertumbuhan wisman melalui upaya-upaya co-marketing, horizontal, on-line/off-line dan less budget-high impact.







Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen. Inspektur Jenderal dibantu oleh 4 orang pejabat Eselon II yaitu: Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur Wilayah I, Inspektur Wilayah III.



Inspektorat Jenderal memiliki tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Terwujudnya Good Governance dan Clean Governance merupakan agenda pokok bagi pimpinan dan staf di jajaran Depbudpar. Dalam hubungan tersebut, peran Inspektorat Jenderal yang merupakan bagian integral dari sistem manajemen departemen menjadi lebih penting dan strategis dalam mengawal pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata, dan seharusnya peran tersebut harus sudah bergeser dari hanya sebagai pengawas (watchdog) menjadi lebih sebagai konsultan dan katalis pembawa perubahan.

Watchdog adalah peran konvensional dari pengawas internal yang mencakup pekerjaan menginspeksi, observasi, menghitung, cek dan ricek yang tujuannya adalah memastikan ketaatan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan organisasi. Peran watchdog biasanya menghasilkan rekomendasi yang mempunyai dampak jangka panjang pendek. Disamping sebagai watchdog, pengawas internal dapat berperan sebagai konsultan dengan memberikan advice tentang sistem pengendalian dengan rekomendasi yang biasanya bersifat jangka menengah. Peran katalis menempatkan pengawas sebagai fasilitator dan agent of change yang mendorong oerubahan ke arah yang lebih baik.

Dalam tahun 2008, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara. Dalam melaksanakan fungsinya Inspektorat Jenderal telah menetapkan kebijakan antara lain: pencegahan terhadap penyimpangan dan perilaku korupsi di lingkungan Depbudpar serta peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar aparat pengawasan dan penegak hukum. Selain itu Inspektorat Jenderal senantiasa melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dati instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan bersama-sama sekretariat jenderal menyiapkan bahan yang disampaikan kepada Menpan secara kontinyu. Disamping itu, secara preventif telah melaksanakan:

- Sosialisasi Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi kepada seluruh pejabat Depbudpar baik Pusat maupun UPT dengan melibatkan instansi seperti KPK dan Kementerian PAN;
- 2. Membangun dan mengembangkan manajemen Kinerja (Sistem AKIP), dengan kegiatan pokok Evaluasi Audit Kinerja di Lingkungan Depbudpar;
- 3. Membangun dan mengembangkan manajemen Keuangan dan Sistem Akuntabilitas Pemerintah, dengan pokok evaluasi dan Audit Keuangan Internal;
- 4. Meningkatkan kapasitas SDM pengawas melalui pelatihan-pelatihan teknis bidang pengawasan dan mengikutsertakan tenaga pengawas dalam jenjang pendidikan S1 dan S2 bidang akuntansi;
- 5. Sosialisasi berbagai produk hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban pembangunan;

- 6. Melakukan bimbingan dalam bidang sistem akuntabilitas kinerja, sehingga sistem SAKIP dapat diterapkan secara baik;
- 7. Menetapkan kebijakan-kebijakan pengawasan yang mengarah pada peningkatan kinerja, baik keuangan maupun pelaksanaan;
- 8. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan kasus-kasus.

Posisi temuan hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dalam tahun 2008 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2008

Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa temuan **yang bukan** merupakan Tuntuntan Ganti Rugi (TGR) yang meliputi : kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas laporan keuangan, sistem pencatatan dan pelaporan, prosedur pencatatan Barang Milik Negara dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan berupa penilaian aset tetap dan pemindahan hak aset dari Depdiknas yang belum diserahkan ke Depbudpar.

2. Hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2008

Telah dilakukan terhadap 35 obyek yang diperiksa baik di Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebudayaan dan Pariwisata dan menghasilkan 319 temuan yang terdiri dari temuan kerugian Negara dan kewajiban penyetoran kepada negara sebanyak 120 temuan dengan nilai sebesar Rp.535.723.614,-.

Temuan bersifat kerugian negara dan penyetoran kepada negara yang telah ditindaklanjuti sebanyak 62 temuan serta kerugian yang telah disetor ke kas Negara sebesar Rp. 323.028.402,-, sedangkan temuan yang bersifat administrasi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 66 temuan. Sisa temuan yang bersifat kerugian negara dan penyetoran kepada negara yang masih dalam proses tindak lanjut sebanyak 58 temuan dengan nilai Rp. 212.695.212,-, selebihnya sebanyak 78 temuan merupakan temuan yang bersifat administratif.

EVALUASI

Di dalam tahun 2008, di samping pelaksanaan kegiatan pengawasan; telah juga dilakukan beberapa kegiatan pendukungan yang diarahkan untuk lebih memantapkan fungsi APIP dalam rangka memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas manajemen di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi, antara lain:

- Penyusunan sistem dan prosedur pengawasan, dimaksudkan untuk mengukur dan menyusun indikator yang terukur guna menilai efektivitas keikutsertaan Depbudpar pada event baik dalam maupun luar negeri;
- Pengembangan data base dalam rangka mendukung percepatan pemrosesan data-data keuangan, temuan pemeriksaan, maupun data kinerja;
- 3. Tindak lanjut Inpres nomor 5 tahun 2004, yaitu dengan melakukan beberapa kajian, meliputi:
 - 1) Kajian e procurement, untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Depbudpar; AMARIAN TANAN PARIMASATA
 - 2) Kajian pelayanan publik, di<mark>mak</mark>sudkan agar dapat memberikan kejelasan atas rangkaian publik di lingkungan Depbudpar.
- 4. Monitoring dan evaluasi terhadap beberapa kegiatan yang dilakukan di daerah unggulan, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan. Dari hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi perhatian setiap unit kerja dalam menyusun kegiatan.





Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata

Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur penunjang pelaksana tugas Departeman, yang dipimpin oleh seorang Kepala, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata dibantu oleh 5 orang pejabat Eselon II yaitu: Sekretaris Badan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi

Nasional, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan, Kepala

Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan dan Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan Fungsi:

- 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata, serta penelitian dan pengembangan arkeologi.
 - Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Departemen.
 - Pelayanan teknis administrasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya.



Pengembangan sumber daya manusia dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kerjasama agar terwujudnya "zero unemployment" SDM lulusan UPT Diklat dilingkungan Depbudpar. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya dan kerjasama antar lembaga dalam mendukung pembangunan kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan SDM kebudayaan dan pariwisata melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi dan program kerjasama
- 2. Meningkatkan peran dan fungsi kelitbangan melalui pemanfaatan langsung hasil-hasilnya oleh masyarakat serta sebagai bahan perumusan kebijakan.
- 3. Meningkatkan fasilitasi koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata.

Hasil yang dicapai dari kegiatan-kegiatan pokok pada tahun 2008 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPSD, antara lain meliputi:

1. Di Bidang Pendidikan Tinggi

Jumlah kelulusan mahasiswa tahun 2008 dari ke 4 Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Tinggi berjumlah 934 orang dari 1161 yang ditargetkan, atau 80% dari target. Sedangkan jumlah mahasiswa aktif pada posisi Nopember tahun 2008 berjumlah 4137 mahasiswa. Besarnya jumlah mahasiswa yang harus dididik berkonsekuensi pada kebutuhan anggaran yang mendukungnya. Prestasi lain yang menjadi keberhasilan pendidikan tinggi adalah diperolehnya ijin menyelenggarakan program Strata 1 (S1) untuk bidang kepariwisataan.



2. Di Bidang Pengembangan Kebijakan SDM Budpar

Dilakukan review terhadap beberapa kurikulum terutama kurikulum pengembangan SDM bidang pariwisata. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan penyiapan SDM pariwisata ke luar negeri, seperti ke Dubai serta beberapa negara di kawasan Timur Tengah lainnya. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan tinggi di bidang pariwisata, telah dilaksanakan kegiatan akreditasi *Tourism Education Quality (TED Qual)* sehingga mendapatkan sertifikasi dari lembaga internasional.

3. Aspek Peningkatan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Jumlah SDM dari unsur masyarakat, aparatur, dan pelaku industri pariwisata telah diberikan pembekalan teknis bidang kebudayaan dan kepariwisataan sebanyak 800 orang. Program tersebut dinilai berhasil, hal ini didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan terhadap perserta bahwa dengan pembekalan tersebut sangat bermanfaat bagi perserta pembekalan, terutama bagi mereka yang bertugas di daerah-daeran tujuan wisata.

4. Sembilan Jenis Pembekalan Terhadap SDM Frontliners Bidang Pariwisata

Dalam kaitannya dengan kegiatan pendukungan peningkatan kapasitas pengelolaan kebudayaan dan pariwisata yang sekaligus juga mendukung program *Visit Indonesia Year* 2008, telah dilakukan 9 jenis pembekalan terhadap 900 SDM front liners bidang pariwisata, antara lain petugas CIQ di bandara, para pengemudi taksi, petugas keamanan bandara, porter, para pedagang asongan di obyek-obyek wisata, manajemen dan trainer pada beberapa perusahaan taksi di Jakarta, serta pengelolaan barang milik negara (SA-BMN).



Diimplementasikan melalui pembekalan pelayanan prima terhadap petugas *front liners* di 15 Ibu Kota Propinsi di Indonesia yang membantu peserta dalam rangka meningkatkan kesadaran akan arti penting pelayanan kepada wisatawan, beberapa teknik-teknik dan *tip and trick* memberikan pelayanan, serta bagaimana mencintai dan meningkatkan pemahaman sikap dasar profesi.

6. Di Bidang Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan

Telah dilakukan serangkaian kegiatan penelitian terapan terutama dalam rangka mendukung program *Visit Indonesia Year* 2008. Penelitian dibidang kepariwisataan difokuskan pada aspek daya saing pariwisata Indonesia di antara kepariwisataan negara-negara tetangga, aspek psikografi pasar terutama pasar potensial seperti India, China, dan Malaysia.

7. Penelitian di Bidang Kebudayaan

Difokuskan pada kegiatan penelitian untuk menggali budaya kontemporer, budaya-budaya di daerah perbatasan, serta keragaman etnografi di Indonesia. Selain itu guna meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan, juga dilakukan kegiatan advokasi, yaitu sejenis pendampingan kepada masyarakat dalam mewujudkan pelestarian kebudayaan daerah.

8. Penelitian di Bidang Arkeologi

Difokuskan pada penelitian interaksi manusia masa lampau, keanekaragaman budaya Nusantara, perdagangan insuler di Nusantara, serta pencarian asal-usul persebaran puak-puak Melayu. Menyadari arti penting pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan temuan benda purbakala, telah dilaksanakan upaya pemasyarakatan hasil-hasil penelitian dan temuan benda sejarah purbakala melalui beberapa event pameran yang diselenggarakan di tempat keramaian seperti di pusat perbelanjaan (*Archeology Goes to Mall*).

9. Evaluasi Pameran

Masyarakat sangat *appreciate* terhadap benda-benda sejarah purbakala hasil temuan peneliti arkeologi. Selain melalui pameran, sosialisasi dalam rangka meningkatkan *awareness* terhadap Benda Cagar Budaya juga dilaksanakan melalui berbagai seminar dan diskusi yang secara periodik dilaksanakan setiap tahunnya, seperti melalui forum Evaluasi Penelitian Arkeologi yang dilaksanakan secara bergiliran di kota-kota sesuai dengan program yang ditetapkan.

10. Di Bidang Kerjasama

Dilakukan beberapa kegiatan untuk meningkatkan pengembangan SDM serta kelembagaan pendidikan tinggi kepariwisataan, melalui pemberian beasiswa, pendukungan bagi mahasiswa melaksanakan praktek kerja lapangan, penyusunan tesis pariwisata, pertemuan baik dalam skala internasional, regional, dan nasional. Diselenggarakannya executive committee meeting and a technical seminar bagi anggota Asia Pacific Education Training Institute in Tourism di Bali.

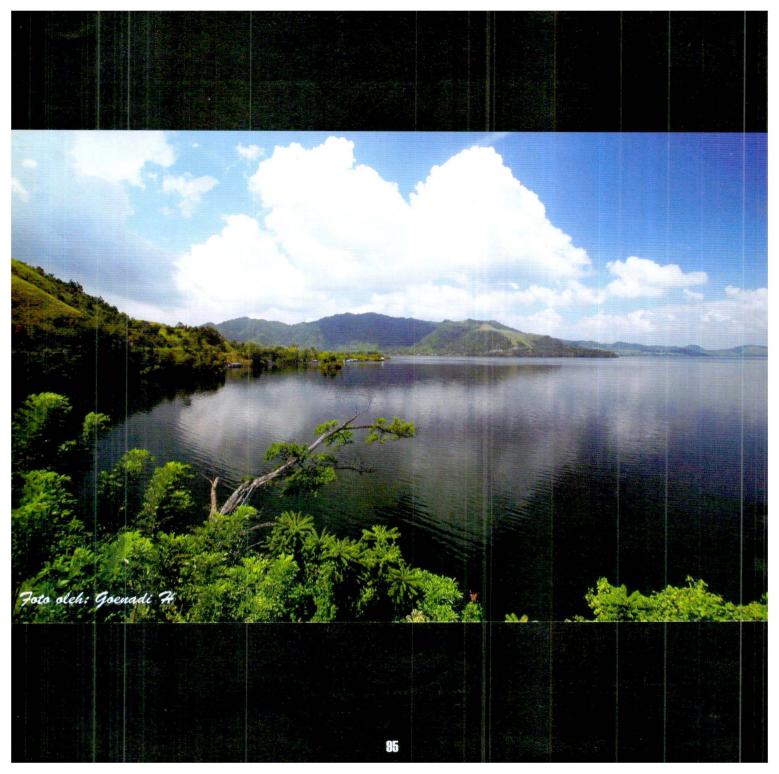


EVALUASI

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan program pengembangan kemitraan pada tahun 2008 telah ada kesesuaian antar kebijakan, program dan kegiatan. Keberhasilan tersebut diketahui dari:

- 1 Meningkatnya kemampuan SDM (aparatur pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat) di bidang kebudayaan dan pariwisata,
- 2. Meningkatnya hasil-hasil penelitian di bidang kebudayaan, pariwisata dan arkeologi yang dapat dimanfaatkan, terutama untuk kepentingan kebijakan pengembangan kebudayaan dan pariwisata,
- Meningkatnya kerjasama antara lembaga pendidikan pariwisata dengan lembaga sejenis maupun dengan industri di dalam dan di luar negeri, serta
- 4. Meningkatnya persepsi dan kerjasama antar pelaku dalam oembagunan kebudayaan dan pariwisata di daerah.

Pada tahun 2009 untuk bidang kelembagaan diarahkan pendidikan tinggi meningkat akreditasinya dan mendapat pengakuan internasional, sehingga lulusan peserta didiknya diakui secara internasional. Untuk bidang penelitian dan pengembangan, diarahkan pada aspek pembudayaannya, sehingga prosesi penelitian menjadi sesuatu yang menarik bagi publik, baik nasional maupun internasional. Di bidang pengembangan SDM diarahkan untuk melakukan pemetaan SDM, baik dari sisi penyediaan maupun permintaannya, melalui perencanaan. Dilakukan pembekalan tentang kebudayaan dan kepariwisataan bagi SDM (aparatur pemerintah, swasta dan masyarakat) di daerah, terutama di 15 destinasi unggulan. Selain itu secara nasional direncanakan pembekalan terhadap 990 aparatur bidang kebudayaan dan pariwisata, melalui kegiatan pembekalan teknis pelayanan prima pada 30 aparatur pada tiap-tiap provinsi.





Staf Ahli Menteri

Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

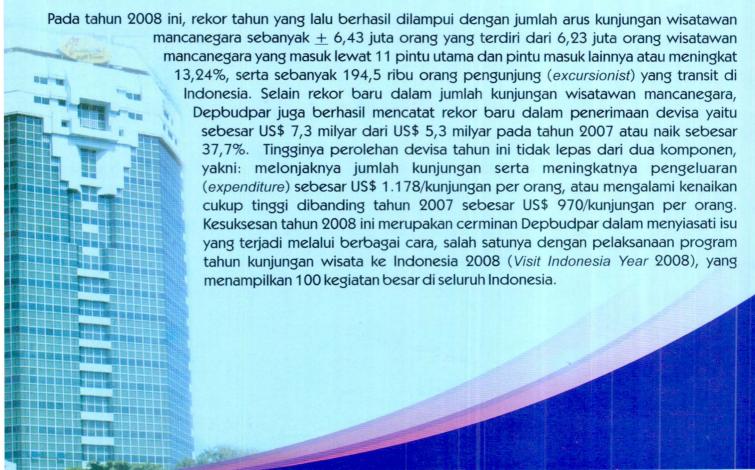


Staf Ahli Menteri merupakan unsur pembantu Menteri di bidang keahlian tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Staf Ahli Menteri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata. Staf Ahli Menteri terdiri dari 4 (empat) orang dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- Staf Ahli Bidang Pranata Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pranata sosial.
- Staf Ahli Bidang Multikultural mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai multikultural.
- 3. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- 4. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

REKOR BARU JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN JUMLAH PENERIMAAN DEVISA

Perkembangan kepariwisataan nasional mengalami pertumbuhan relatif stagnan yang berkisar pada angka kunjungan 5 juta sejak satu dasawarsa terakhir. Kunjungan terendah sebanyak 4,5 juta orang dicapai pada tahun 2003, sedangkan tertinggi sebanyak 5,5 juta orang dicapai pada tahun lalu. Pada tahun 2007 yang lalu merupakan rekor tertinggi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.



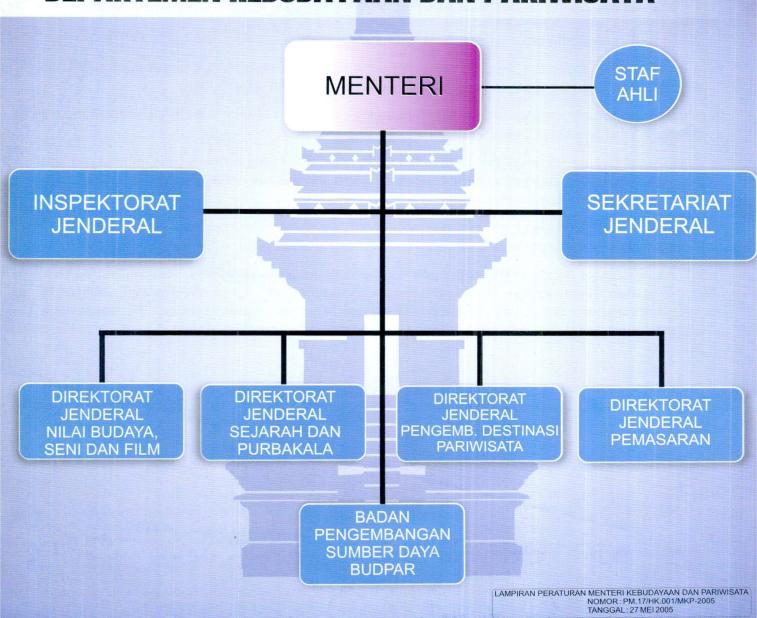
Kunci sukses program Visit Indonesia Year 2008 di antaranya adalah:

- 1. Menjadikan Visit Indonesia Year 2008 sebagai tema sentral dalam berbagai kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata Indonesia di dalam dan di luar negeri selama tahun 2008;
- 2. Pemantapan rencana kegiatan melalui koordinasi yang efektif antar seluruh stakeholders terkait seperti pelaku industri pariwisata, pemerintah dan masyarakat;
- Pelaksanaan kegiatan promosi dan pemasaran pada tahun 2007 yang terfokus guna mendukung Visit Indonesia Year 2008 dengan mengalokasikan anggaran yang sesuai untuk meningkatkan partisipasi media nasional dan internasional; serta
- 4. Mengkonsentrasikan kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata melalui penyelenggaran event-event akbar secara merata di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2008.

Pada tahun 2008 juga dilakukan kegiatan dukungan kembali pada 5 provinsi lagi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Tujuan kegiatan pendukungan ini adalah untuk mempercepat perkembangan kepariwisataan di provinsi-provinsi tersebut. Pelaksanaannya adalah dengan lebih mengarahkan promosi pada pasar utama mereka masing-masing.



STRUKTUR ORGANISASI DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

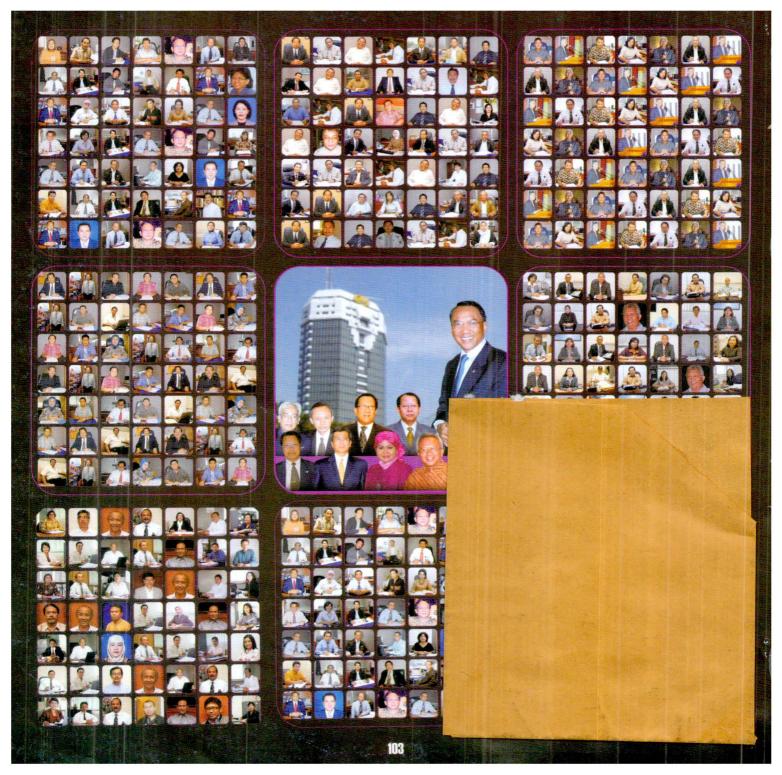


PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



JUMLAH PEGAWAI			TINGKAT PENDIDIKAN											
		IV	111	II	1	53	S2	S1	III.D	ILD	L D.J	SLTA	SLTP	SD
KANTOR PUSAT	1.800	246	1.219	331	4	11	173	703	90	1	0	735	45	42
KANTOR UPT	3.621	209	1.837	1.523	52	10	191	1.069	110	4	2	1.368	460	407
JUMLAH	5,421	455	3.056	1.854	56	21	364	1.772	200	5	2	2.103	505	449

KANTOR	GENDER		USIA								AGAMA						
	PRIA	WANITA	18-30	31-40	41-45	48-50	51-56	57-60	> 60	ISLAM	PROTESTAN	KATOLIK	HINDU	BUDHA	KONG HUCU		
PUSAT	1,131	689	103	381	435	442	419	20	0	1.569	124	76	30	0	1		
UPT	2.853	788	153	747	794	788	826	296	1.7	2.680	268	161	511	1	0		
JUMLAH	3.984	1.437	256	1.128	1.229	1.230	1.245	316	17	4.249	392	237	541	1	1		







Sapta Desona



Perpusta Jender